



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra-PD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah serta RPJMN, dimana Renstra-PD berfungsi sebagai arah kinerja dan pelayanan SKPD. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

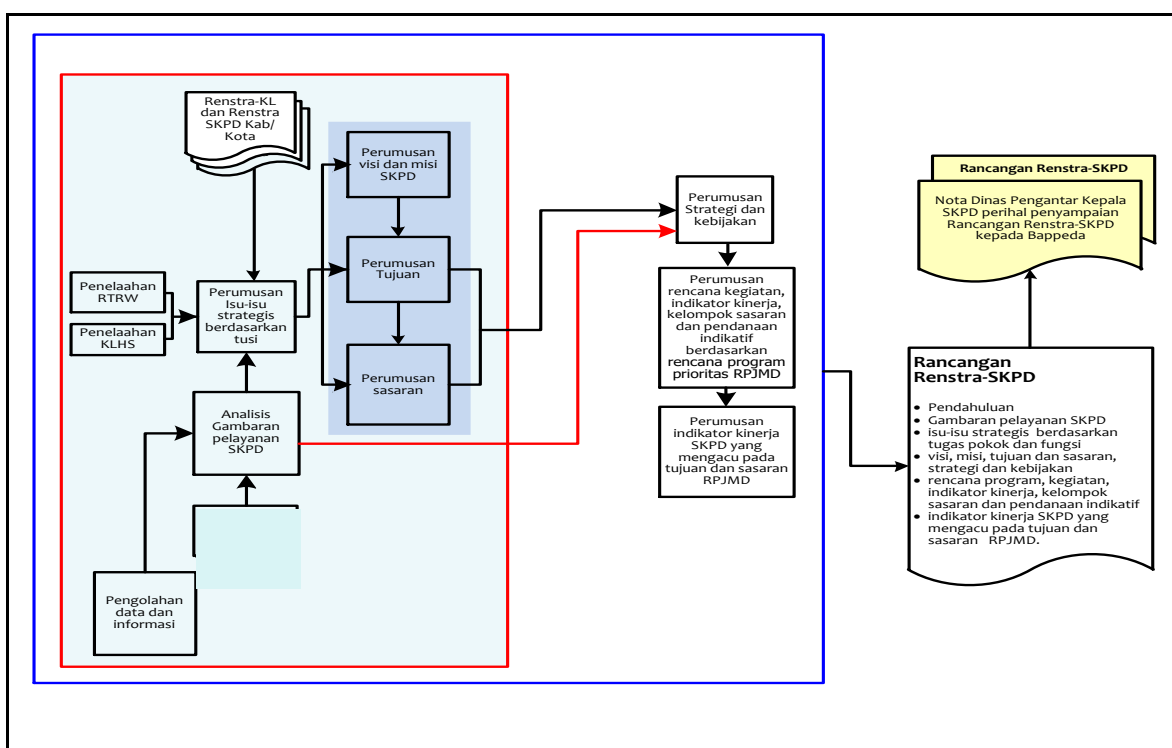
Dalam Era Baru Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai implementasi pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana didalamnya terdapat pengaturan tentang urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota serta diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas PP-PAD 2016-2021 tersebut disusun sesuai dengan tugas fungsi yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 71 Tahun 2008, namun dalam perjalanannya terjadi perubahan Nomenklatur Kelembagaan, yaitu pada Akhir Tahun 2016 dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara.

Selanjutnya dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan *Review* terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021, yang diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2015-2019 tersebut perlu dilakukan perubahan atau penyempurnaan untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif, memuat program-program pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2016-2021, dengan penekanan pada pencapaian sasaran RPJMD, Prioritas Nasional, dan *Sustainable Development Goals (SDG's)*.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Keberadaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (DPP-PAD) Provinsi Sulut 2016-2021 dalam kaitannya dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah merujuk pada agenda pembangunan baik dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Utara 2005-2025, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021 maupun RKPD yang akan dijadikan acuan atau pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja DPP-PA Provinsi Sulawesi Utara selama periode Perencanaan *dan menjadi acuan atau pedoman renstra, renja kab/kota*. Dalam kaitannya dengan Sistem Keuangan Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maka penjabaran Renstra adalah dasar setiap tahunnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) untuk lima tahun kedepan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
 14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 16. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 18. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 20. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 21. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
 22. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
 23. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
 24. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

25. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
26. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
27. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
28. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
29. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
36. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
41. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
42. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
43. Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 Provinsi Sulawesi Utara;

44. Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara ;
45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
46. Perda Sulut Nomor 11 Tahun 2016 Tentang RPJMD Prov. Sulut Tahun 2016-2021
47. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
51. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 60 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi tipe A Provinsi Sulawesi Utara

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah:

1. Tersedianya suatu dokumen perencanaan strategis yang secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan daerah Provinsi Sulawesi Utara di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016-2021;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2016-2021;
3. Untuk lebih memantapkan kegiatan dalam mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan program kerja dan kegiatan terdapat keteraturan, keterarahan yang mendukung tepat waktunya realisasi kegiatan dalam mewujudkan suatu sistem budaya birokrat yang akuntabel dan transparan;

1.3. Sistematika Penulisan.

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi

perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah.

Bab VI Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Daerah dimana Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya secara optimal sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan serta untuk meningkatkan sumber daya pembangunan menuntut Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara untuk semakin meningkatkan kreatifitas dan kinerjanya. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja inspektorat, Badan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Utara dan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 60 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi Utara. Dinas ini merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Daerah.

1. Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan unsur pendukung Gubernur mempunyai tugas menyiapkan, melaksanakan dan koordinasi pembinaan, pengumpulan data, analisis dan pengkajian masalah, perencanaan, penyusunan dan perumusan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan perlindungan anak.

2. Fungsi

Sedangkan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah :

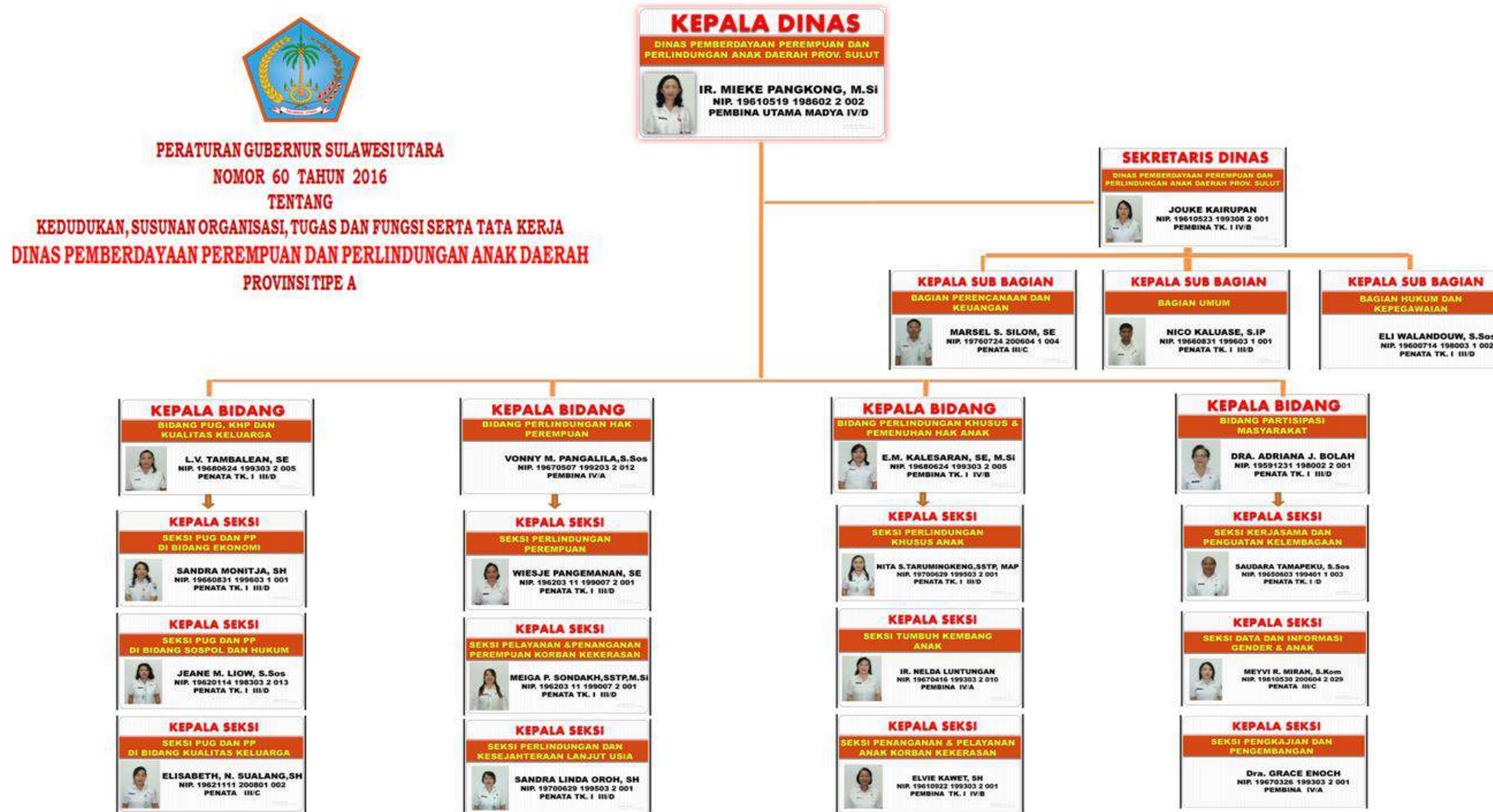
- 1) Penyiapan bahan dan analisa data dalam rangka penyempurnaan dan penyusunan kebijakan teknis;
- 2) Penyusunan, perencanaan, pengkoordinasian penyelenggaraan pembinaan dan penggerakan pelaksanaan tugas kegiatan pemberdayaan partisipasi perempuan, upaya peningkatan, peran serta masyarakat dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) Memfasilitasi kegiatan organisasi perempuan dan LSM yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan perlindungan anak.

3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka dibentuklah Struktur Organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas (Eselon II)
2. Sekretaris Dinas (Eselon III)
3. Kepala Bidang – Bidang (Eselon III) :
 - a. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender, Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;
 - b. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
 - c. Kepala Bidang Perlindungan Khusus dan Pemenuhan Hak Anak;
 - d. Kepala Bidang Partisipasi Masyarakat.
4. Kepala Sub-Sub Bagian / Sub-Sub Bidang (Eselon IV) :
 - a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Umum;
 - d. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi;
 - e. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Sosial, Politik dan Hukum;
 - f. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Kualitas Keluarga;
 - g. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan;
 - h. Kepala Seksi Penanganan dan Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan;
 - i. Kepala Seksi Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia;
 - j. Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak;

- k. Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak;
- l. Kepala Seksi Penanganan dan Pelayanan Anak Korban Kekerasan;
- m. Seksi Kerjasama dan Penguatan Kelembagaan;
- n. Kepala Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak;
- o. Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan



2.2. Sumber Daya PD

1. Sumber Daya Aparatur

Tenaga kerja dan sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam menunjang pelaksanaan fungsi suatu organisasi. Jumlah Pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara berjumlah 49 pegawai terdiri dari 13 laki-laki dan 36 Perempuan, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

DATA JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL TAHUN 2017 (Keadaan Bulan April)

| No | Nama Jabatan Struktural | Eselonisasi | Jumlah Formasi | Formasi yang Terisi | Jenis Kelamin | |
|----|---|--------------------|----------------|---------------------|---------------|-------------|
| | | | | | Perempuan | Laki-laki |
| 1. | Kepala Dinas | IIa IIIc IVa | 1 5 15 | 1 5 15 | 1 5 11 | - - 4 |
| 2. | Sekretaris / | | | | | |
| 3. | Kepala Bidang Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang | | | | | |
| | | Jumlah | 21 | 21 | 16 | 4 |

DATA PNS MENURUT KLASIFIKASI PENDIDIKAN (Keadaan April 2017)

| No. | Klasifikasi Pendidikan | Jumlah | Jenis Kelamin | |
|-----|-----------------------------|--------|---------------|-----------|
| | | | Perempuan | Laki-laki |
| 1 | Program Pascasarjana (S2) | 5 | 5 | - |
| 2 | Sarjana (S1) | 26 | 20 | 6 |
| 3 | Diploma (D3) / Sarjana Muda | 6 | 5 | 1 |
| 4 | SLTA/SMK | 11 | 6 | 5 |
| 5 | SLTP | 1 | - | 1 |
| | Jumlah | 49 | 36 | 13 |

DATA PNS MENURUT PANGKAT/GOLONGAN (April 2017)

| No. | Pangkat/Gol | Jumlah PNS | Jenis Kelamin | |
|-----|---------------------------|------------|---------------|-----------|
| | | | Perempuan | Laki-laki |
| 1. | Pembina Utama Muda / IV c | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Pembina Tk I / IV b | 4 | 4 | 0 |
| 3. | Pembina / IVa | 3 | 3 | - |
| 4. | Penata Tk.I / III d | 12 | 9 | 3 |
| 5. | Penata / III c | 10 | 8 | 2 |
| 6. | Penata Muda Tk.I / III b | 5 | 5 | - |
| 7. | Penata Muda / III a | 5 | 3 | 2 |
| 8. | Pengatur Tk.I / II d | 1 | 1 | - |
| 9. | Pengatur / II c | 4 | 2 | 2 |
| 10. | Pengatur Muda Tk.I / II b | 1 | - | 1 |
| 11. | Pengatur Muda / II a | 2 | 1 | 1 |
| 12. | Juru / I c | 1 | - | 1 |
| | Jumlah | 49 | 36 | 13 |

Data PNS Menurut Diklat Penjurusan
 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah
 Provinsi Sulawesi Utara

| No | Diklat | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|----|---------|---------------|-----------|--------|
| | | Perempuan | Laki-laki | |
| 1 | PIM II | | - | 1 |
| 2 | PIM III | 5 | 1 | 6 |
| 3 | PIM IV | 2 | - | 2 |
| 4 | ADUM | 0 | 1 | 6 |

2. Aset dan Barang Inventaris PD

Aset dan barang inventaris yang dikelola Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara,

Daftar Inventaris Barang

| NO | NAMA ASET | MERKEK/TYPER | JLH UNIT | KON DISI | TAHUN PEROLEHAN |
|----|---------------|-----------------------------|----------|----------|-----------------|
| 1 | Station Wagon | Toyota Kijang / Station EFI | 1 | B | 2003 |

| | | | | | |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------|---|----------|------|
| 2 | Station Wagon | Toyota Kijang/Innova 2.0 G | 1 | B | 2008 |
| 3 | Sepeda Motor | Kawazaki AN 130C/KAZE ZXVR | 1 | B | 2006 |
| 4 | Sepeda Motor | Kawazaki AN 130C/KAZE ZXVR | 1 | B | 2006 |
| 5 | Sepeda Motor | Suzuki / EN125A | 1 | B | 2008 |
| 6 | CPU | Simbada | 1 | KB | 2004 |
| 7 | CPU | Power | 1 | B | |
| 8 | P.C. Unit | Compaq,Sharp,Logitech | 1 | RB | 2000 |
| 9 | P.C. Unit | Accer Aspire/SA10,AC501 | 1 | B | 2005 |
| 10 | P.C. Unit | Accer Aspire/SA80,LCD AL 1516 | 1 | B | 2006 |
| 11 | P.C. Unit | Power UP, LG, BENQ | 1 | B | 2007 |
| 12 | P.C. Unit | Asus,LG Flatron,Simbada | 1 | B | 2008 |
| 13 | P.C. Unit | Votre | 2 | B, RB | 2010 |
| 14 | Laptop | Toshiba | 1 | B | 2005 |
| 15 | Laptop | Toshiba Satellite Series | 1 | B | 2006 |
| 16 | Laptop | Toshiba Satellite Series/PMAE0075 | 1 | B | 2007 |
| 17 | Laptop | Toshiba Satellite Series | 1 | B | 2007 |
| 18 | Laptop | Toshiba | 1 | B | 2010 |
| 19 | Monitor | LG | 1 | RB | 2003 |
| 20 | Monitor | LG Flatron (ez) T730SH | 1 | B | |
| 21 | Monitor | Acer | 1 | RB | 2004 |
| 22 | Printer | HP Deskjet/F 3535 | 1 | RB | 2003 |
| 23 | Printer | HP Deskjet/D 1360 | 1 | RB | 2006 |
| 24 | Printer | Canon IP 1200 | 1 | RB | 2006 |
| 25 | Printer | HP Deskjet/F 380 | 1 | RB | 2007 |
| 26 | Printer | Canon IP 3680 | 2 | B | 2010 |
| 27 | Keyboard | Logitech | 1 | KB | 2004 |
| 28 | Unintemuptible Power Supply (UPS) | Prolink/2 KW | 2 | RB | 2007 |
| 29 | Peralatan Personal Komputer Lain-lain | Stavol Matsunaga | 2 | KB | 2010 |
| 30 | AC Unit | Toshiba | 1 | B | 2005 |
| 31 | AC Unit | TCL | 1 | B | 2006 |
| 32 | AC Unit | LG | 3 | B | 2007 |
| 33 | Film Projector | BENQ | 1 | B | 2010 |
| 34 | Lemari Besi | Asahi | 2 | B | |
| 35 | Lemari Kayu | Lokal | 1 | B | 2004 |
| 36 | Lemari Kayu | Lokal | 2 | B | 2007 |
| 37 | Lemari Kayu | | 2 | B | 2010 |
| 38 | Lemari Buku untuk Perpustakaan | Lokal | 1 | KB | 2000 |
| 39 | Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II | Lokal | 1 | B | 2004 |
| 40 | Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II | DN | 2 | B | 2006 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|--------|----|----|------|
| 41 | Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II | Lokal | 2 | B | 2007 |
| 42 | Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III | Lokal | 2 | B | 2004 |
| 43 | Lemari Pakaian | DN | 1 | B | 2005 |
| 44 | Rak Arsib Besar | | 1 | RB | |
| 45 | Rak Buku | | 1 | | 2007 |
| 46 | Filling Kabinet | Yunika | 1 | RB | |
| 47 | Filling Besi/Metal | DN | 1 | B | 2000 |
| 48 | Filling Besi/Metal | Unyca | 1 | KB | 2004 |
| 49 | Filling Besi/Metal | LUFO | 1 | B | 2004 |
| 50 | Filling Besi/Metal | LUFO | 1 | B | 2006 |
| 51 | Filling Besi/Metal | VIP | 4 | B | 2007 |
| 52 | Meja Komputer | UCHIWA | 1 | RB | 2000 |
| 53 | Meja Biro | Lokal | 3 | B | |
| 54 | Meja Biro | Lokal | 1 | KB | 2000 |
| 55 | Meja Biro | Lokal | 1 | B | 2000 |
| 56 | Meja Biro | Lokal | 3 | KB | 2007 |
| 57 | Meja 1/2 Biro | | 2 | B | 2010 |
| 58 | Meja 1/2 Biro | Lokal | 11 | B | |
| 59 | Meja Rapat | Lokal | 1 | B | 2006 |
| 60 | Meja Panjang | Lokal | 2 | B | |
| 61 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | Lokal | 1 | B | 2006 |
| 62 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | Lokal | 1 | B | 2000 |
| 63 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | Lokal | 5 | B | 2000 |
| 64 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | Lokal | 4 | B | 2000 |
| 65 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | Lokal | 1 | B | 2000 |
| 66 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | Lokal | 1 | B | 2004 |
| 67 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | Lokal | 1 | B | 2004 |
| 68 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | Lokal | 1 | B | 2004 |
| 69 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | Lokal | 1 | B | 2004 |
| 70 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | Lokal | 1 | B | 2005 |
| 71 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | Lokal | 6 | B | 2006 |
| 72 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | Lokal | 6 | B | 2007 |
| 73 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | DN | 1 | B | 2006 |
| 74 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | | 1 | B | 2007 |
| 75 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | | 1 | B | 2007 |
| 76 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | | 1 | B | 2007 |
| 77 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | Rakuda | 4 | B | 2010 |

| | | | | | |
|-----|---|---|----|----|------|
| 78 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | Lokal | 6 | B | 2007 |
| 79 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | Lokal | 1 | RB | 2000 |
| 80 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | Lokal | 1 | RB | 2000 |
| 81 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | Lokal | 1 | B | 2004 |
| 82 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | Lokal | 4 | B | 2004 |
| 83 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | Lokal | 10 | B | 2006 |
| 84 | Kursi Lipat | Chitose/Hitam | 1 | B | 2000 |
| 85 | Kursi Lipat | Chitose/Hitam | 2 | KB | 2000 |
| 86 | Kursi Lipat | Chitose/Hitam | 1 | B | 2000 |
| 87 | Kursi Lipat | Chitose | 3 | KB | 2000 |
| 88 | Kursi Lipat | Chitose | 2 | B | 2000 |
| 89 | Kursi Lipat | Chitose | 24 | B | 2007 |
| 90 | Pesawat Aiphone | Panasonic | 2 | RR | 2000 |
| 91 | Mesin Ketik Manual Standar (14-16) | | 1 | KB | 2000 |
| 92 | Zice | DN | 1 | B | 2000 |
| 93 | Zice | Ukiran Gajah | 1 | B | 2006 |
| 94 | Televisi | Sony Trinitron Colour | 1 | B | 2006 |
| 95 | White Board | DN | 1 | B | 2007 |
| 96 | White Board | | 1 | B | 2007 |
| 97 | Compact Disk | LG/LMD2360 | 1 | B | 2007 |
| 98 | Jeep | TOYOTA / FORTUNER 2,5 G M/T 4 X 2 | 1 | B | 2011 |
| 99 | Wireless | EW.MH-300 / Amplifier Por Multi Functiontable | 1 | B | 2011 |
| 100 | Handy Cam | SANYO / VPC-FHI | 1 | B | 2011 |
| 101 | Internet | ARTICONET / ACN.110R ADSL 2 + ROUTER | 1 | B | 2011 |
| 102 | Laptop | TOSHIBA / INTEL CORE I3 370 M (2,4 GHZ) | 1 | B | 2011 |
| 103 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | | 1 | B | 2011 |
| 104 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | | 6 | B | 2011 |
| 105 | Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III | | 1 | B | 2011 |
| 106 | Camera Film | CANON / 50 D | 1 | B | 2011 |
| 107 | Mesin Absensi | SOLUTION / X 100C | 2 | B | 2011 |
| 108 | Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)/SOFTWARE/APLIKASI | | 1 | B | 2011 |
| 109 | P.C Unit | LENOVA / H.330 | 1 | B | 2011 |
| 110 | Printer | HP / LASERJET 1102 | 1 | B | 2011 |
| 111 | Unintemuptible Power Supply (UPS) | ICA / CE 1200 VA | 2 | B | 2011 |
| 112 | Sepeda Motor | KAWASAKI | 4 | B | 2012 |
| 113 | AC Unit | | 1 | B | 2012 |

| | | | | | |
|-----|--|-------------------------|----|---|------|
| 114 | Mesin Ketik | MANUAL PORTABLE (11-13) | 2 | B | 2012 |
| 115 | Filling Besi Metal | | 3 | B | 2012 |
| 116 | Lemari Kayu | | 7 | B | 2012 |
| 117 | Sofa | BERNINI | 1 | B | 2012 |
| 118 | Kursi Plastik | NAPOLLY | 1 | B | 2012 |
| 119 | Televisi | TCL | 4 | B | 2012 |
| 120 | Kain Gorden | | 2 | B | 2012 |
| 121 | Notebook | TOSHIBA | 8 | B | 2012 |
| 123 | Printer | CANON IP 2770 | 11 | B | 2012 |
| 124 | Kursi kerja Pejabat | | 9 | B | 2012 |
| 125 | Lemari Arsip | | 7 | B | 2012 |
| 126 | Standing AC | TCL | 1 | B | 2013 |
| 127 | Meja Rapat | | 1 | B | 2013 |
| 128 | Kursi Rapat | | 25 | B | 2013 |
| 129 | Komputer Note Book | SONY VAIO | 4 | B | 2013 |
| 130 | Station Wagon | DAIHATSU TERIOS | 1 | B | 2013 |
| 131 | AC | | 1 | B | 2013 |
| 132 | Genset/generator | | 1 | B | 2013 |
| 133 | Tangga | | 1 | B | 2013 |
| 134 | Almari | | 1 | B | 2013 |
| 135 | Gorden | | 1 | B | 2013 |
| 136 | Kipas Angin | | 1 | B | 2013 |
| 137 | TV/Perlengkapan Visualisasi | | 1 | B | 2013 |
| 138 | Dispenser | | 1 | B | 2013 |
| 139 | Kulkas | | 1 | B | 2013 |
| 140 | Kamera | CANON | 1 | B | 2013 |
| 141 | PC Komputer | LENOVO | 1 | B | 2013 |
| 142 | Printer | CANON | 2 | B | 2013 |
| 143 | UPS/Stabilizer | | 2 | B | 2013 |
| 144 | Meja Kerja | | 25 | B | 2013 |
| 145 | Meja Makan | | 1 | B | 2013 |
| 146 | Kursi Kerja | | 25 | B | 2013 |
| 147 | Kursi Makan | | 6 | B | 2013 |
| 148 | Tempat Tidur | | 5 | B | 2013 |
| 149 | Sofa | | 1 | B | 2013 |
| 150 | Buku Peraturan | | 1 | B | 2013 |
| 151 | Almari | | 4 | B | 2014 |
| 152 | gorden/vertical blend/ horisontal blend | | 1 | B | 2014 |
| 153 | Meja Ping-Pong | | 1 | B | 2014 |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|----|---|------|
| 154 | Komputer PC | | 4 | B | 2014 |
| 155 | Printer | | 4 | B | 2014 |
| 156 | Hard disk | | 3 | B | 2014 |
| 157 | Tabung Gas | | 1 | B | 2014 |
| 158 | Kompor Gas | | 1 | B | 2014 |
| 159 | Kulkas | | 3 | B | 2014 |
| 160 | Kamera | | 1 | B | 2014 |
| 161 | Proyektor LCD | | 1 | B | 2014 |
| 162 | Faximili | | 1 | B | 2014 |
| 163 | Meja Kerja | | 2 | B | 2014 |
| 164 | Kursi Rapat | | 25 | B | 2014 |
| 165 | Karpet | | 1 | B | 2015 |
| 166 | Vacum Cleaner | | 1 | B | 2015 |
| 167 | CCTV | | 14 | B | 2015 |
| 168 | Sound System | | 1 | B | 2015 |
| 169 | Mesin Absensi | | 2 | B | 2015 |
| 170 | MESIN FINGER PRINT | | 1 | B | 2016 |
| 171 | PERSONAL KOMPUTER DAN LAPTOP | | 1 | B | 2016 |
| 172 | MESIN:FOTOCOPY, LAPTOP DAN PRINTER | | 1 | B | 2016 |
| 173 | KOMPUTER UNIT JARINGAN (SIMDA ONLINE) | | 1 | B | 2016 |
| 174 | MEJA, KURSI DAN LEMARI) | | 1 | B | 2016 |
| 175 | ALAT RUMAH TANGGA (AC DAN TV) | | 1 | B | 2016 |
| 176 | ALAT TELEKOMUNIKASI | | 1 | B | 2016 |

2.3 Kinerja Pelayanan PD

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menyatakan bahwa seluruh departemen maupun lembaga pemerintah non departemen di pemerintahan nasional, provinsi, kabupaten/kota harus memasukkan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pada kebijakan program dalam pembangunan. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai salah satu tujuan SDGs (Sustainable Development Goals) yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dari segi kualitas kehidupan masih terjadi kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan baik secara nasional maupun daerah. Penyebabnya antara lain pembangunan belum mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil antara laki-laki dan perempuan. Hal ini memberi kontribusi timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang termanifestasi dalam persoalan marginalisasi, subordinasi, beban ganda, stereotype, kekerasan, diskriminasi, dan kemiskinan. Selain itu dampak dari berbagai produk peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan bias gender turut memberi andil terpuruknya kualitas hidup kaum perempuan. Rendahnya kualitas hidup perempuan berimbas pada kesejahteraan dan perlindungan anak yang masih jauh dari harapan.

Partisipasi perempuan Sulawesi Utara di lembaga politik Tahun 2015 sebesar 30,25 % dan Tahun 2010 sebesar 22,92 %. Dari 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Utara sebanyak 11 perempuan duduk sebagai anggota dewan, dan keterwakilan di tingkat nasional sebesar 50% karena dari 6 orang utusan Sulawesi Utara di DPR RI, sebanyak 3 orang perempuan. Hal itu menunjukkan cukup signifikannya partisipasi perempuan di lembaga politik.

Peran partai politik berkaitan dengan pemihakan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat akan terlihat pada mekanisme pencalonan anggota legislatif. Ketentuan kuota seperti termuat dalam undang-undang mesti disikapi hati-hati. Kuota 30% bagi perempuan tidak bersifat mutlak dan mengikat sehingga tetap terbuka peluang bagi partai politik menempatkan calon perempuan sekadar pengumpul suara (vote getter) atau alat legitimasi. Selain itu, partai politik juga mungkin secara

sepihak menempatkan wakil-wakil perempuan yang tidak memiliki perspektif dan keberpihakan terhadap nilai, prinsip, dan aspirasi masyarakat. Perempuan Sulawesi Utara pada kenyataannya menjadi penentu kebijakan dan kini saatnya perempuan diperhitungkan di politik, 15 anggota dewan perempuan dari total 45 anggota DPRD Sulawesi Utara mempengaruhi kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang responsive gender, yang holistik, terpadu dan terintegrasi. Di lembaga pemerintah sekitar 20% perempuan menduduki posisi strategis sebagai pemimpin daerah di kabupaten/kota dimana saat ini terdapat 3 Bupati dan 1 walikota perempuan, 1 Wakil Bupati perempuan dan 1 Wakil Walikota perempuan. Diantara berbagai keberhasilan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus diakui bahwa Pemerintah Sulawesi Utara masih perlu memberikan perlindungan terhadap anggota masyarakat yang berusia 60 tahun keatas, karena adalah tanggung jawab dan kewajiban bagi pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Di bidang pendidikan perempuan masih tertinggal, dapat dilihat dari rata-rata lamanya sekolah dimana laki-laki adalah 9,16 tahun sedangkan perempuan adalah 9,09 tahun. Di bidang ekonomi, usaha mikro dan kecil 45% dikelola oleh perempuan dan lebih dari 60% pelaku usaha mikro adalah perempuan yang jika dikembangkan lebih jauh akan dapat membuka lapangan kerja, terutama di tingkat perdesaan. Sementara dukungan untuk mereka masih terbatas, program pembangunan dapat mendorong perkembangan lebih jauh untuk membentuk wiraswasta-wiraswasta baru yang mendukung perekonomian di Sulawesi Utara.

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sulawesi Utara merupakan parameter untuk mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar yakni Harapan Hidup, Tingkat Pendidikan dan Pendapatan dengan memperhitungkan ketimpangan gender, Angka Harapan Hidup Perempuan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota lebih tinggi dari Angka Harapan Hidup Laki-laki. Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah cenderung lebih tinggi, laki-laki daripada perempuan, Sumbangan pendapatan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik yang

mencakup partisipasi politik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan.

Indeks Pembangunan Gender Tahun 2015 Sulut naik posisinya kalau Tahun 2013 hanya 75 thn berada di urutan ke 4 nasional naik 2015 menjadi 94.58 berada urutan ke 2 nasional urutan pertama dki 94.80 dan urutan 3 Jogja yaitu 94.31

Peran partai politik berkaitan dengan pemihakan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat akan terlihat pada mekanisme pencalonan anggota legislatif. Ketentuan kuota seperti termuat dalam undang-undang mesti disikapi hati-hati. Kuota 30% bagi perempuan tidak bersifat mutlak dan mengikat sehingga tetap terbuka peluang bagi partai politik menempatkan calon perempuan sekadar pengumpul suara (vote getter) atau alat legitimasi. Selain itu, partai politik juga mungkin secara sepihak menempatkan wakil-wakil perempuan yang tidak memiliki perspektif dan keberpihakan terhadap nilai, prinsip, dan aspirasi masyarakat.

Perempuan Sulawesi Utara pada kenyataannya menjadi penentu kebijakan dan kini saatnya perempuan diperhitungkan di politik. DPRD Sulawesi Utara yang dipimpin perempuan termasuk 12 anggota dewan perempuan dari total 45 anggota DPRD Sulawesi Utara. Dewan provinsi yang dihuni banyak legislator perempuan menjadi bukti kapasitas perempuan di dunia politik. Di lembaga pemerintah sekitar 20% perempuan menduduki posisi strategis

sebagai pemimpin daerah di kabupaten/kota dimana saat ini terdapat 3 Bupati perempuan, 1 Wakil Bupati perempuan dan 1 Wakil Walikota perempuan. Diantara berbagai keberhasilan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus diakui bahwa Pemerintah Sulawesi Utara masih perlu memberikan perlindungan terhadap anggota masyarakat yang berusia 60 tahun keatas, karena adalah tanggung jawab dan kewajiban bagi pemerintah, masyarakat, dan keluarga.

Di bidang pendidikan perempuan masih tertinggal, dapat dilihat dari rata-rata lamanya sekolah dimana laki-laki adalah 9,07 tahun sedangkan perempuan adalah 8,72 tahun. Di bidang ekonomi, usaha mikro dan kecil 45% dikelola oleh perempuan dan lebih dari 60% pelaku usaha mikro adalah perempuan yang jika dikembangkan lebih jauh akan

dapat membuka lapangan kerja, terutama di tingkat perdesaan. Sementara dukungan untuk mereka masih terbatas, program pembangunan dapat mendorong perkembangan lebih jauh untuk membentuk wiraswasta-wiraswasta baru yang mendukung perekonomian di Sulawesi Utara.

Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak

Pembangunan Anak dilakukan sesuai dengan pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 dengan menggunakan prinsip-prinsip pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak sebagaimana tercantum pada konvensi hak anak (KHA) yaitu non diskriminasi, hak untuk hidup tumbuh dan berkembang, mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, dan menghargai partisipasi anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa, untuk itu perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, berkewajiban untuk membuat langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, bangsa dan Negara untuk mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak

Tabel
Jumlah penduduk di bawah 18 tahun di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015 menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

| Kode | Provinsi/Kab/Kota | Laki-laki | | | | | Perempuan | | | | | TOTAL |
|------|---------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-18 | JUMLAH | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-18 | JUMLAH | |
| | | 11,692 | 11,395 | 11,238 | 8,210 | 42,535 | 10,939 | 10,834 | 10,494 | 7,174 | 39,441 | 81,976 |
| 7102 | MINAHASA | 12,893 | 13,098 | 13,156 | 10,527 | 49,674 | 12,168 | 12,488 | 12,544 | 10,189 | 47,389 | 97,063 |
| 7103 | KEPULAUAN SANGIHE | 5,020 | 4,982 | 5,546 | 4,647 | 20,195 | 4,622 | 4,756 | 5,223 | 4,115 | 18,716 | 38,911 |
| 7104 | KEPULAUAN TALAUD | 4,148 | 3,972 | 4,329 | 2,964 | 15,413 | 3,864 | 3,688 | 3,922 | 2,576 | 14,050 | 29,463 |
| 7105 | MINAHASA SELATAN | 8,765 | 9,269 | 9,352 | 6,105 | 33,491 | 8,361 | 8,876 | 8,605 | 5,441 | 31,283 | 64,774 |
| 7106 | MINAHASA UTARA | 8,961 | 8,698 | 8,744 | 6,698 | 33,101 | 8,775 | 8,467 | 8,075 | 6,318 | 31,635 | 64,735 |
| 7107 | BOLAANG MONGONDOW UTARA | 3,874 | 4,084 | 3,871 | 2,674 | 14,503 | 3,770 | 3,855 | 3,476 | 2,532 | 13,633 | 28,136 |
| 7108 | SIAU TAGULANDANG BIARO | 2,428 | 2,577 | 2,810 | 2,009 | 9,824 | 2,471 | 2,519 | 2,562 | 1,891 | 9,443 | 19,267 |
| 7109 | MINAHASA TENGGARA | 5,067 | 5,136 | 4,988 | 3,305 | 18,496 | 4,906 | 4,831 | 4,794 | 2,888 | 17,419 | 35,915 |
| 7110 | BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 3,708 | 3,495 | 3,213 | 2,267 | 12,683 | 3,498 | 3,375 | 2,890 | 1,993 | 11,756 | 24,439 |
| 7111 | BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 3,213 | 3,221 | 3,145 | 2,414 | 11,993 | 3,089 | 3,093 | 2,965 | 2,198 | 11,345 | 23,337 |
| 7171 | MANADO | 17,938 | 17,049 | 17,048 | 15,362 | 67,397 | 17,219 | 16,251 | 16,461 | 15,722 | 65,653 | 133,051 |
| 7172 | BITUNG | 10,383 | 9,650 | 8,807 | 7,249 | 36,089 | 9,859 | 9,193 | 8,571 | 6,569 | 34,192 | 70,281 |
| 7173 | TOMOHOH | 3,911 | 3,975 | 4,220 | 3,577 | 15,683 | 3,589 | 3,769 | 3,852 | 3,580 | 14,790 | 30,473 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 7174 | KOTAMOBAGU | 5,359 | 5,198 | 5,219 | 4,409 | 20,185 | 5,170 | 5,103 | 4,926 | 4,590 | 19,789 | 39,973 |
| 71 | SULAWESI UTARA | 107,360 | 105,799 | 105,686 | 82,416 | 401,261 | 102,300 | 101,098 | 99,360 | 77,775 | 380,533 | 781,794 |

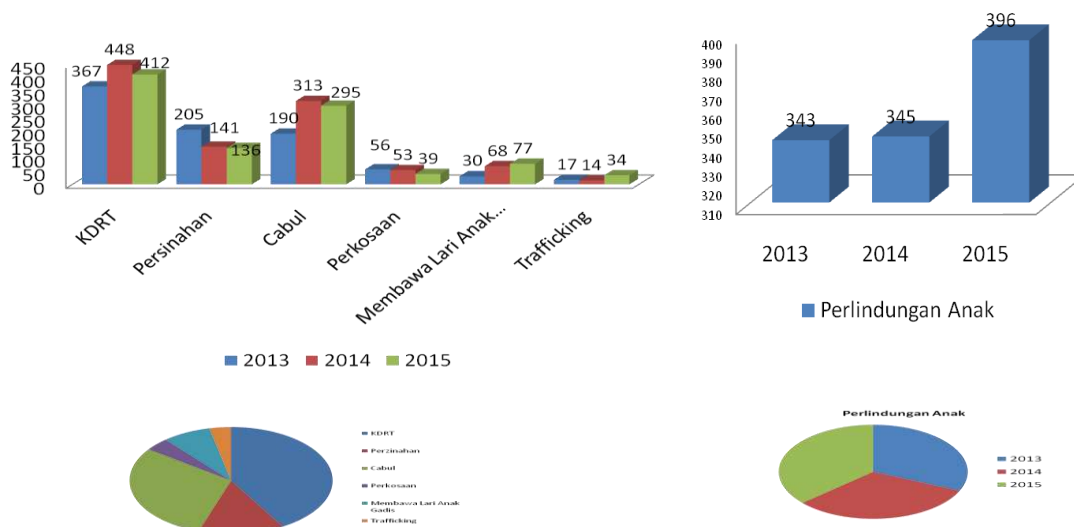
Dibidang Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak anak, menjadi salah satu persoalan penting dalam upaya peningkatan kualitas hidup karena kualitas hidup manusia sangat ditentukan sejak usia dini. Anak merupakan penerus bangsa merekalah yang akan menentukan nasib bangsa ini dimasa mendatang oleh sebab itu pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi prioritas dalam pembangunan.

Gambaran kondisi anak saat ini menjadi dasar penting bagi penyusunan kebijakan yang tepat bagi anak. Capaian dalam Upaya Pemenuhan hak dan perlindungan anak dilakukan dapat dilihat dari Partisipasi anak, sebagai penjabaran peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak No. 3 Tahun 2011 tentang kebijakan partisipasi anak dan No. 4 Tahun 2011 tentang pembentukan forum anak, maka sampai dengan tahun 2015 tercatat 9 Kabupaten/kota yang sudah membentuk Forum Anak Daerah yang terdiri dari Kota Tomohon, Kotamobagu, Bitung, Manado, Kabupaten Minahasa, Bolmong Selatan, Minahasa Selatan Minahasa Utara, Sitaro. Selanjutnya dalam upaya Peningkatan Kualitas Hidup dan Tumbuh Kembang Anak dalam hal mewujudkan lingkungan layak bagi anak, maka telah didorong 2 kabupaten/kota (Kota Manado, Kota Tomohon) untuk pengembangan kabupaten/kota Menuju kota layak anak (KLA) dan secara kelembagaan 4 Kabupaten/Kota yang telah membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak yang meliputi Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, Kota Bitung dan Kotamobagu.

Kualitas hidup anak tidak hanya dilihat pada bidang pendidikan dan Kualitas Kesehatan tetapi Kualitas Hidup anak juga ditentukan dari perlindungan terhadap tindak kekerasan, berdasarkan data angka kekerasan prevalensi kekerasan terhadap anak cukup tinggi yaitu sebanyak 396 kasus. kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat kekerasan terhadap anak akan sangat berdampak terhadap tumbuh kembang mereka. masih tingginya angka kekerasan terhadap anak baik tindak kekerasan, eksploitasi,

penelantaran dan perlakuan salah lainnya dengan jumlah kasus kekerasan sebagai berikut :

DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI SULAWESI UTARA YANG DITANGANI OLEH POLDA SULUT DAN JAJARANNYA TAHUN 2013-2015



Kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini semakin meingkat dan memprihatinkan. Sampai dengan tahun 2015 Kasus kekerasan terhadp perempuan dan anak khususnya KDRT sebanyak 412 Kasus, Cabul sebanyak 295 Kasus, Perkosaan 39 Kasus, Membawa lari anak 77 Kasus dan Traficking sebanyak 34 kasus, sedangkan trend Khusus Perlindungan Anak meningkat dari Tahun 2013 sebanyak 343 Kasus, menjadi 396 kasus pada tahun 2016.

Kebutuhan Lembaga perlindungan sebagai pememuhan hak korban sangat diperlukan bagi masyarakat ketika mengalami kekerasan. Saat ini tercatat sampai dengan tahun 2015 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) sebagai lembaga layanan terpadu yang sudah dibentuk di Provinsi Sulawesi Utara 1 P2TP2A dan Kabupaten /kota sebanyak 7 P2TP2A yang meliputi Kota Bitung, Kota Manado, Kab. Boltim, Kab. Minahasa Utara, Kab. Minahasa, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Kab. Bolaang Mongondow Timur. Dari hasil pemetaan yang mendapat Predikat Maju adalah P2TP2A Provinsi, Predikat Berkembang adalah P2TP2A Kota Manado, Kota Bitung,

Kabupaten Minahasa Utara, Bolaang Mongondow Timur dan Bolaang Mongondow Selatan, 4 P2TP2A dalam kategori dasar. Namun demikian Sarana Prasarana pada umumnya belum memadai untuk mendukung seluruh aktivitas dalam menjalankan fungsi P2TP2A terkecuali P2TP2A Provinsi dan P2TP2A Kota Manado, sedangkan anggaran masih belum mencukupi bahkan ada beberapa Kabupaten /Kota belum memiliki anggaran serta Sumber Daya Manusia masih dibutuhkan terutama tenaga fungsional yang memiliki kompetensi sesuai pedoman pelaksanaan fungsi P2TP2A sebagai pusat informasi dan pusat pemberdayaan, sedangkan pusat pelayanan sudah dapat dijangkau melalui kerjasama/MOU dengan lembaga layanan lainnya. Pelaksanaan fungsi P2TP2A sebagian besar belum memahami secara komprehensif akan fungsi P2TP2A yang terdiri dari tiga fungsi yaitu : Pusat Informasi, Pusat Pelayanan dan Pusat Pemberdayaan. Terkecuali P2TP2A Provinsi yang sudah melaksanakannya walaupun belum maksimal.

P2TP2A sebagai fungsi pelayanan penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sejak tahun 2013 s.d 2015 telah menangani kasus kekerasan sebagaimana pada data dibawah ini.

**DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
DI PROVINSI SULAWESI UTARA
YANG DITANGANI OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK (P2TP2A) PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2013 S/D 2015**



SUMBER DATA : P2TP2A PROVINSI SULAWESI UTARA

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD DPP-PAD
Provinsi Sulawesi Utara

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|------------|------------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 1 (2011) | 2 (2012) | 3 (2013) | 4 (2014) | 5 (2015) | 1 (2011) | 2 (2012) | 3 (2013) | 4 (2014) | 5 (2015) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | Jumlah peraturan/ sosialisasi kebijakan kualitas hidup anak dan perempuan | | | | 2 sosialisasi terkait kesetaraan gender dan perlindungan anak | 2 sosialisasi terkait kesetaraan gender dan perlindungan anak | 1 Kebijakan (tumbuh kembang anak/ kota layak anak), 1 Workshop Peran dan posisi perempuan dalam jabatan politik dan Monev | 1 Naskah Akademik Ranperda Kesetaraan dan Keadilan Gender | Rancangan Peraturan Daerah Kesetaraan dan Keadilan Gender | 2 sosialisasi terkait kesetaraan gender dan perlindungan anak | 2 sosialisasi terkait kesetaraan gender dan perlindungan anak | 1 Kebijakan (tumbuh kembang anak/ kota layak anak), 1 Workshop Peran dan posisi perempuan dalam jabatan politik dan Monev | 1 Naskah Akademik Ranperda Kesetaraan dan Keadilan Gender | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Jumlah Lembaga Peduli Perempuan dan Anak | | | | 2 Organisasi | 2 Organisasi | 2 Organisasi | 2 Organisasi | 2 Organisasi | 2 Organisasi | 2 Organisasi | 2 Organisasi | 2 Organisasi | | | | | | |
| | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | | | | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | | | | | | | | | | | 100% | 100% | 34% | | | | | |
| | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | | | | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 34 % | | | | | |
| | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | | | | 65.48% | 65.90% | 66.50% | 67.20% | 68.00% | 66.75% | 67.39% | 69.82% | 75.00% | 75.00% | | | | | |
| | Ratio Kekerasan dalam rumah tangga | | | | 67.32% | 65.90% | 66.50% | 67.20% | 68.00% | 67.32% | 68.16% | 69.11% | 69.11% | 69.11% | | | | | |

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|--|------------|------------|--------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 1 (2011) | 2 (2012) | 3 (2013) | 4 (2014) | 5 (2015) | 1 (2011) | 2 (2012) | 3 (2013) | 4 (2014) | 5 (2015) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | | | | 0.40% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.20% | 37 % | 39% | 36 % | 45% | | | | | | |
| | Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%) | | | | 31.84% | 33.00% | 35.00% | 37.00% | 39.00% | 31.84% | 38.10% | 38.60% | 52.27% | 44.00% | | | | | |
| | Porprosi Kursi parlemen yang diduduki perempuan | | | | 5% | 8% | 10% | 12% | 14% | 49% | 51.8% | 52.0% | 32% | | | | | | |
| | Jumlah kader parpol perempuan yg mendapatkan pendidikan politik | | | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 28.90% | 28.90% | 28.90% | 28.90% | 33.33% | | | | | |
| | Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan | | | | 50 | 100 | 150 | 200 | 200 | 150 | 150 | 340 | 220 | 100 | | | | | |

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPP-PAD
Provinsi Sulawesi Utara

| Uraian ***) | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 |
| A. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gaji dan Tunjangan | 1,776,484,000 | 1,607,056,000 | 1,782,054,402 | 2,098,945,000 | 2,084,095,976 | 1,494,042,014 | 1,587,748,307 | 1,738,834,144 | 2,084,095,976 | 477,229,424 | 89 | 99 | 98 | 99 | 23 | 1,869,727,075.60 | 1,476,389,973 |
| Tambahan Penghasilan PNS | 792,225,000 | 733,275,000 | 742,348,000 | 1,211,410,000 | 1,170,426,724 | 726,512,500 | 725,363,375 | 726,655,000 | 1,170,426,724 | 316,828,071 | 92 | 99 | 98 | 97 | 27 | 929,936,944.80 | 733,157,134 |
| JUMLAH | 2,568,709,000 | 2,340,331,000 | 2,524,402,402 | 3,310,355,000 | 3,254,522,700 | 2,220,554,514 | 2,313,111,682 | 2,465,489,144 | 3,254,522,700 | 794,057,495 | 90 | 99 | 98 | 98 | 24 | 2,799,664,020.40 | 2,209,547,107 |
| B. | BELANJA LANGSUNG | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Penyediaan jasa surat menyurat | 7,000,000 | 1,000,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 4,713,000 | 330,000 | 116,100 | 0 | 0 | 5 | 33 | 5 | #DI V/O! | #DI V/O! | 2,080,000.00 | 1,031,820 |
| - Penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik | 7,200,000 | 7,350,000 | 9,400,000 | 0 | 0 | 4,824,917 | 5,333,998 | 7,396,327 | 0 | 0 | 74 | 73 | 79 | #DI V/O! | #DI V/O! | 4,790,000.00 | 3,511,048 |
| - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 1,000,000 | 4,000,000 | 11,500,000 | 0 | 0 | 400,000 | 2,527,500 | 2,293,000 | 0 | 0 | 253 | 63 | 20 | #DI V/O! | #DI V/O! | 3,300,000.00 | 1,044,100 |
| - Penyediaan kebutuhan administrasi umum | 0 | 0 | 0 | 178,112,500 | 158,148,276 | 0 | 0 | 0 | 1,158,148,276 | 171,915,741 | #DIV /O! | #DI V/O! | #DI V/O! | 650 | 109 | 67,252,155.20 | 266,012,803 |
| - Penyediaan kebutuhan administrasi keuangan | 67,500,000 | 199,280,000 | 134,857,000 | 102,276,000 | 102,258,900 | 59,500,000 | 199,269,000 | 134,132,000 | 102,258,900 | 103,790,490 | 295 | 100 | 99 | 100 | 101 | 121,234,380.00 | 119,790,078 |
| - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 15,000,000 | 0 | 16,600,000 | 0 | 0 | 14,958,070 | 0 | 16,600,000 | 0 | 0 | 0 | #DI V/O! | 100 | #DI V/O! | #DI V/O! | 6,320,000.00 | 6,311,614 |
| - Penyediaan alat tulis kantor | 43,000,000 | 48,000,000 | 48,357,050 | 0 | 0 | 42,984,000 | 48,000,000 | 43,049,050 | 0 | 0 | 112 | 100 | 89 | #DI V/O! | #DI V/O! | 27,871,410.00 | 26,806,610 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|-------------|
| - | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 30,000,000 | 80,000,000 | 53,245,650 | 0 | 0 | 29,770,675 | 72,665,000 | 53,236,850 | 0 | 0 | 242 | 91 | 100 | #DI V/O! | #DI V/O! | 32,649,130.00 | 31,134,505 |
| - | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 0 | 6,250,000 | 3,950,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,191,000 | 0 | 0 | #DIV /O! | 0 | 55 | #DI V/O! | #DI V/O! | 2,040,000.00 | 438,200 |
| - | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 44,000,000 | 8,400,000 | 14,000,000 | 0 | 0 | 44,000,000 | 8,400,000 | 14,000,000 | 0 | 0 | 19 | 100 | 100 | #DI V/O! | #DI V/O! | 13,280,000.00 | 13,280,000 |
| - | Penyediaan makanan dan minuman | 44,000,000 | 56,200,000 | 58,800,000 | 0 | 0 | 44,000,000 | 56,200,000 | 58,788,521 | 0 | 0 | 128 | 100 | 100 | #DI V/O! | #DI V/O! | 31,800,000.00 | 31,797,704 |
| - | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 184,714,000 | 192,000,000 | 0 | 0 | 0 | 184,577,800 | 186,301,900 | 0 | 0 | 0 | 101 | 97 | #DI V/O! | #DI V/O! | #DI V/O! | 75,342,800.00 | 74,175,940 |
| - | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 40,000,000 | 53,788,900 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 49,411,000 | 0 | 0 | 0 | 124 | 92 | #DI V/O! | #DI V/O! | #DI V/O! | 18,757,780.00 | 17,882,200 |
| - | Penyediaan kebutuhan administrasi barang/jasa | 0 | 0 | 0 | 36,462,100 | 34,226,767 | 0 | 0 | 0 | 34,226,767 | 46,850,000 | #DIV /O! | #DI V/O! | #DI V/O! | 94 | 137 | 14,137,773.40 | 16,215,353 |
| - | Penyediaan jasa administrasi kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 12,680,000 | 12,653,000 | 0 | 0 | 0 | 12,653,000 | 7,074,500 | #DIV /O! | #DI V/O! | #DI V/O! | 100 | 56 | 5,066,600.00 | 3,945,500 |
| - | Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi | 0 | 0 | 360,185,000 | 287,000,500 | 286,921,726 | 0 | 0 | 352,746,500 | 286,921,726 | 243,440,349 | #DIV /O! | #DI V/O! | 98 | 100 | 85 | 186,821,445.20 | 176,621,715 |
| 2 | Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | #DIV /O! | #DI V/O! | #DI V/O! | #DI V/O! | #DI V/O! | - | 0 |
| - | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | 375,000,000 | 72,000,000 | 187,000,000 | 0 | 0 | 361,900,000 | 72,000,000 | 186,400,000 | 0 | 0 | 19 | 100 | 100 | #DI V/O! | #DI V/O! | 126,800,000.00 | 124,060,000 |
| - | Pengadaan mesin absensi | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,830,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DI V/O! | #DI V/O! | #DI V/O! | #DI V/O! | 10,000,000.00 | 9,966,000 |
| - | Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,298,700 | #DIV /O! | #DI V/O! | #DI V/O! | #DI V/O! | #DI V/O! | - | 21,859,740 |
| - | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 0 | 140,900,000 | 207,237,500 | 121,775,000 | 120,794,500 | 0 | 140,550,000 | 183,056,081 | 120,794,500 | 0 | #DIV /O! | 100 | 88 | 99 | 0 | 118,141,400.00 | 88,880,116 |
| - | Pengadaan peralatan Gedung Kantor | 85,000,000 | 172,200,000 | 97,653,400 | 78,300,000 | 76,915,000 | 85,000,000 | 171,875,000 | 91,741,375 | 76,915,000 | 0 | 202 | 100 | 94 | 98 | 0 | 102,013,680.00 | 85,106,275 |
| - | Pengadaan peralatan mebeleur | 20,000,000 | 51,500,000 | 133,000,000 | 38,500,000 | 38,483,500 | 20,000,000 | 50,975,000 | 97,468,250 | 38,483,500 | 0 | 255 | 99 | 73 | 100 | 0 | 56,296,700.00 | 41,385,350 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|----------------|------------|
| - | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 0 | 0 | 15,366,400 | 11,573,400 | 0 | 0 | 11,573,400 | 1,003,000 | #DIV /0! | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | 75 | 9 | 5,387,960.00 | 2,515,280 | | |
| - | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | 31,000,000 | 0 | 0 | 0 | 31,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | 6,200,000.00 | 6,200,000 | | |
| - | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 40,670,000 | 185,736,000 | 140,292,000 | 128,788,000 | 108,479,388 | 40,670,000 | 166,266,100 | 91,456,961 | 108,479,388 | 10,481,893 | 409 | 90 | 65 | 84 | 10 | 120,793,077.60 | 83,470,868 |
| - | Pembangunan Gedung Pameran | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,902,500 | 0 | 0 | #DIV /0! | #DI V/0 ! | 100 | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | 30,000,000.00 | 29,980,500 |
| - | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 0 | 257,927,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,927,000 | 0 | 0 | #DIV /0! | 100 | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | 51,585,400.00 | 51,585,400 |
| - | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV /0! | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | - | 0 |
| - | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 0 | 0 | 0 | 11,398,000 | 11,398,000 | 0 | 0 | 0 | 11,398,000 | 0 | #DIV /0! | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | 100 | 0 | 4,559,200.00 | 2,279,600 |
| - | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 0 | 0 | 0 | 19,800,000 | 19,800,000 | 0 | 0 | 0 | 19,800,000 | 0 | #DIV /0! | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | 100 | 0 | 7,920,000.00 | 3,960,000 |
| - | Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran | 0 | 0 | 0 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | #DIV /0! | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | 100 | 0 | 60,000,000.00 | 30,000,000 |
| 3 | Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | #DIV /0! | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | - | 0 |
| - | Pengadaan mesin/kartu absensi | 0 | 0 | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV /0! | #DI V/0 ! | 0 | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | 3,600,000.00 | 0 |
| - | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 18,000,000 | 0 | 6,000,000 | 11,500,000 | 11,385,000 | 18,000,000 | 0 | 6,000,000 | 11,385,000 | 0 | 0 | #DI V/0 ! | 100 | 99 | 0 | 9,377,000.00 | 7,077,000 |
| - | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 0 | 14,000,000 | 18,000,000 | 24,000,000 | 23,980,000 | 0 | 13,910,000 | 17,996,000 | 23,980,000 | 0 | #DIV /0! | 99 | 100 | 100 | 0 | 15,996,000.00 | 11,177,200 |
| 4 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | #DIV /0! | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | - | 0 |
| - | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 0 | 68,754,100 | 61,000,000 | 31,125,000 | 16,355,610 | 0 | 68,754,100 | 8,452,000 | 16,355,610 | 16,355,610 | #DIV /0! | 100 | 14 | 53 | 100 | 35,446,942.00 | 21,983,464 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----|----------------|-------------|
| 5 | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan | | | | | | | | | | | #DIV /0! | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | #DI V/0! | #DI V/0 ! | - | 0 | |
| | - | Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 31,216,000 | 10,000,000 | 30,923,000 | 9,659,800 | 9,089,500 | 15,608,000 | 9,998,000 | 23,349,000 | 9,089,500 | 0 | 32 | 100 | 76 | 94 | 0 | 18,177,660.00 | 11,608,900 |
| | - | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | 12,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 4,518,500 | 3,795,500 | 6,000,000 | 13,995,000 | 5,886,000 | 3,795,500 | 0 | 117 | 100 | 42 | 84 | 0 | 9,662,800.00 | 5,935,300 |
| | - | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 15,000,000 | 19,500,000 | 16,000,000 | 3,175,000 | 3,138,000 | 0 | 19,440,000 | 14,830,000 | 3,138,000 | 5,683,300 | 130 | 100 | 93 | 99 | 181 | 11,362,600.00 | 8,618,260 |
| 6 | Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak & Perempuan | | | | | | | | | | | #DIV /0! | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | #DI V/0! | #V AL UE! | - | 0 | |
| | - | Perumusan kebijakan peningkatan peran & posisi perempuan di bidang politik & jabatan publik | 33,000,000 | 579,795,000 | 187,237,400 | 336,109,600 | 227,525,400 | 33,000,000 | 403,920,500 | 150,646,540 | 227,525,400 | 0 | 1,224 | 70 | 80 | 68 | 0 | 272,733,480.00 | 163,018,488 |
| | - | Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan & perlindungan anak | 400,000,000 | 102,750,000 | 255,043,000 | 183,299,000 | 181,843,000 | 322,502,000 | 94,238,000 | 237,498,800 | 181,843,000 | 0 | 24 | 92 | 93 | 99 | 0 | 224,587,000.00 | 167,216,360 |
| | - | Monitoring, evaluasi & pelaporan | 20,000,000 | 43,500,000 | 69,962,000 | 77,895,000 | 77,255,000 | 16,000,000 | 40,109,000 | 67,187,800 | 77,255,000 | 24,917,000 | 201 | 92 | 96 | 99 | 32 | 57,722,400.00 | 45,093,760 |
| 7 | Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | | | | | | | | | | | #DIV /0! | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | #DI V/0! | #DI V/0 ! | - | 0 | |
| | - | Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan | 22,700,000 | 75,608,000 | 31,876,200 | 27,179,000 | 27,179,000 | 22,700,000 | 72,873,000 | 28,571,200 | 27,179,000 | 68,854,700 | 321 | 96 | 90 | 100 | 253 | 36,908,440.00 | 44,035,580 |
| | - | Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) | 25,000,000 | 20,000,000 | 147,868,000 | 306,561,500 | 301,415,200 | 22,459,600 | 0 | 138,863,000 | 301,415,200 | 62,216,200 | 0 | 0 | 94 | 98 | 21 | 160,168,940.00 | 104,990,800 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------------|-------------|
| - | Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) | 0 | 46,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,500,000 | 0 | 0 | 0 | #DIV /0! | 100 | #DI V/0 ! | #DI V/0! | #DI V/0 ! | 9,300,000.00 | 9,300,000 |
| - | Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yg berperan dalam pemberdayaan perempuan & anak | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,986,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | #DI V/0! | #DI V/0 ! | 24,000,000.00 | 20,997,280 |
| - | Penguatan kelembagaan pegasutamaan gender dan anak | 50,000,000 | 154,200,000 | 271,365,000 | 204,466,100 | 204,080,300 | 50,000,000 | 153,834,000 | 243,373,900 | 204,080,300 | 0 | 308 | 100 | 90 | 100 | 0 | 176,822,280.00 | 130,257,640 |
| - | Peningkatan kapasitas & jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan & anak | 50,000,000 | 63,000,000 | 26,589,400 | 54,474,900 | 53,849,900 | 49,940,000 | 59,908,000 | 22,630,900 | 53,849,900 | 0 | 120 | 95 | 85 | 99 | 0 | 49,582,840.00 | 37,265,760 |
| - | Evaluasi pelaksanaan PUG | 0 | 0 | 0 | 15,822,000 | 15,522,000 | 0 | 0 | 0 | 15,522,000 | 0 | #DIV /0! | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | 98 | 0 | 6,268,800.00 | 3,104,400 |
| - | Pengembangan sistem informasi gender dan anak | 55,000,000 | 34,000,000 | 0 | 0 | 0 | 55,000,000 | 31,500,000 | 0 | 0 | 0 | 57 | 93 | #DI V/0 ! | #DI V/0! | #DI V/0 ! | 17,800,000.00 | 17,300,000 |
| - | Monitoring, evaluasi & pelaporan | 25,000,000 | 76,000,000 | 60,147,600 | 36,941,600 | 36,941,600 | 22,459,600 | 74,664,000 | 60,078,600 | 36,941,600 | 0 | 299 | 98 | 100 | 100 | 0 | 47,006,160.00 | 38,828,760 |
| - | Advokasi pengumpulan data kekerasan terhadap anak, masalah sosial anak dan anak berkebutuhan khusus (ABK) | 0 | 0 | 0 | 19,768,000 | 19,768,000 | 0 | 0 | 0 | 19,768,000 | 0 | #DIV /0! | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | 100 | 0 | 7,907,200.00 | 3,953,600 |
| - | Penyusunan profil gender dan anak | 0 | 0 | 0 | 90,000,000 | 88,837,000 | 0 | 0 | 0 | 88,837,000 | 0 | #DIV /0! | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | 99 | 0 | 35,767,400.00 | 17,767,400 |
| 8 | Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan | | | | | | | | | | | #DIV /0! | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | #DI V/0! | #DI V/0 ! | - | 0 |
| - | Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah | 130,000,000 | 54,850,000 | 26,750,000 | 30,629,000 | 30,628,000 | 120,000,000 | 51,212,000 | 20,596,000 | 30,628,000 | 0 | 39 | 93 | 77 | 100 | 0 | 54,571,400.00 | 44,487,200 |
| - | Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT | 0 | 90,500,000 | 61,000,000 | 164,729,000 | 164,529,000 | 0 | 89,000,000 | 60,958,000 | 164,529,000 | 0 | #DIV /0! | 98 | 100 | 100 | 0 | 96,151,600.00 | 62,897,400 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------------|-------------|
| - | Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan | 80,000,000 | 146,635,000 | 46,750,000 | 29,284,000 | 29,230,000 | 70,000,000 | 144,754,800 | 44,000,000 | 29,230,000 | 0 | 181 | 99 | 94 | 100 | 0 | 66,379,800.00 | 57,596,960 |
| - | Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT | 0 | 0 | 32,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,100,000 | 0 | 0 | #DIV /0! | #DI V/0 ! | 97 | #DI V/0! | #DI V/0 ! | 6,400,000.00 | 6,220,000 |
| - | Penyusunan profil perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan | 0 | 0 | 108,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,069,000 | 0 | 0 | #DIV /0! | #DI V/0 ! | 85 | #DI V/0! | #DI V/0 ! | 21,640,000.00 | 18,413,800 |
| - | Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan | 42,000,000 | 95,500,000 | 274,269,400 | 244,218,900 | 199,094,600 | 42,000,000 | 95,399,000 | 251,006,650 | 199,094,600 | 0 | 227 | 100 | 92 | 82 | 0 | 171,016,580.00 | 117,500,050 |
| - | Monitoring, evaluasi & pelaporan | 20,000,000 | 30,500,000 | 45,491,000 | 40,289,000 | 40,289,000 | 19,000,000 | 30,500,000 | 45,490,000 | 40,289,000 | 0 | 153 | 100 | 100 | 100 | 0 | 35,313,800.00 | 27,055,800 |
| - | Sosialisasi perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan/ Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan | 0 | 0 | 0 | 121,246,900 | 115,046,900 | 0 | 0 | 0 | 115,046,900 | 0 | #DIV /0! | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | 95 | 0 | 47,258,760.00 | 23,009,380 |
| 9 | Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | | | | | | | | | | | #DIV /0! | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | #DI V/0! | #DI V/0 ! | - | 0 |
| - | Kegiatan pembinaan organisasi perempuan | 150,000,000 | 90,000,000 | 194,339,400 | 223,203,900 | 203,296,900 | 147,926,300 | 76,496,000 | 176,153,750 | 203,296,900 | 0 | 51 | 85 | 91 | 91 | 0 | 172,168,040.00 | 120,774,590 |
| - | Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta & kesetaraan gender | 80,000,000 | 135,500,000 | 87,849,800 | | | 64,500,000 | 135,380,700 | 73,959,800 | | | 169 | 100 | 84 | #DI V/0! | #DI V/0 ! | 60,669,960.00 | 54,768,100 |
| - | Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera | 0 | 0 | 330,841,000 | 199,207,200 | 198,999,609 | 0 | 0 | 261,528,800 | 198,999,609 | 0 | #DIV /0! | #DI V/0 ! | 79 | 100 | 0 | 145,809,561.80 | 92,105,682 |
| - | Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dlm mengelola usaha | 50,000,000 | 74,376,000 | 157,054,200 | 202,675,500 | 182,262,800 | 49,982,000 | 71,952,000 | 144,425,200 | 182,262,800 | 0 | 144 | 97 | 92 | 90 | 0 | 133,273,700.00 | 89,724,400 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|------------|-------------|-------------|-------------|---|------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|
| - | Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan | 0 | 33,000,000 | 563,005,600 | 248,253,000 | 248,251,624 | 0 | 28,896,000 | 423,640,793 | 248,251,624 | 0 | #DIV /0! | 88 | 75 | 100 | 0 | 218,502,044.80 | 140,157,683 |
| - | Kegiatan advokasi penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) | 0 | 0 | 0 | 78,450,500 | 56,091,900 | 0 | 0 | 0 | 56,091,900 | 0 | #DIV /0! | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | 71 | 0 | 26,908,480.00 | 11,218,380 |
| 10 | Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak | | | | | | | | | | | #DIV /0! | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | - | 0 |
| - | Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan (pelatihan bagi kader politik perempuan) | 0 | 0 | 0 | 225,086,600 | 223,029,400 | 0 | 0 | 0 | 223,029,400 | 31,600,000 | #DIV /0! | #DI V/0 ! | #DI V/0 ! | 99 | 14 | 89,623,200.00 | 50,925,880 |
| - | Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender | 0 | 30,000,000 | 64,960,400 | 49,395,000 | 49,392,000 | 0 | 26,050,000 | 57,391,200 | 49,392,000 | 0 | #DIV /0! | 87 | 88 | 100 | 0 | 38,749,480.00 | 26,566,640 |

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.

2.4.1 Kelemahan dan Kekuatan Internal

Untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam memformulasikan rencana strategis lima tahun kedepan maka analisis lingkungan internal menjadi suatu hal yang sangat krusial. Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan dalam kelemahan (*weakness*) atau kekuatan (*strength*) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Adapun kelemahan-kelemahan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulut diantaranya:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi yang diberikan kepada PD terkait dan publik pada umumnya;
2. Masih kurangnya koordinasi bidang dengan sekretariat maupun antara bidang satu dan lainnya;
3. Belum optimalnya kualitas sinergi antara perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan monitoring;
4. Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan dan pelatihan tenaga aparatur/pegawai baik struktural, fungsional maupun teknis dengan keterbatasan anggaran;
5. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan;
6. Belum terbangunnya Sistem Informasi Manajemen melalui penerapan Teknologi Informasi;
7. Belum memiliki SPM dan SOP untuk kegiatan per bagian terutama menyangkut kegiatan rutin.

Sedangkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara diantaranya :

1. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya;
2. Tersedianya dana APBD sebagai sumber pembiayaan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di daerah;

3. Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
4. Adanya skala prioritas program kerja;
5. Tersedianya dana untuk menunjang kegiatan-kegiatan rutin di masing-masing bagian;
6. Adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan;
7. Kebijakan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Tersedianya sarana dan fasilitas kantor yang memadai;
9. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian.

2.4.2 Tantangan dan Peluang Eksternal

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang-peluang (*Opportunities*) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara, diantaranya:

1. Terbukanya kesempatan untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai baik dari pihak pemerintah, universitas dan lembaga lainnya;
2. Terbukanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Adanya komitmen pimpinan;
4. Peningkatan kesejahteraan pegawai;
5. Pengembangan sistem karir berdasarkan prestasi kerja.

Selain itu analisa lingkungan eksternal memperhadapkan kepada tantangan (*treaths*) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara, diantaranya :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang undang-undang dan peraturan terkait bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
2. Masih banyak anak-anak yang mengalami korban kekerasan oleh orang tua, di sekolah oleh guru dan sesama teman;
3. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan *good governance*;
4. Masih tingginya kasus trafiking (perdagangan orang) di Sulawesi Utara;
5. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang gender;
6. Kesiapan aparatur daerah dalam mengantisipasi proses demokratisasi agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima dari kinerja organisasi publik;
7. Tuntutan masyarakat terhadap aparatur yang bebas dari KKN;
8. Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang melahirkan cara-cara baru berorganisasi yang disebut *e-lifestyle* yang berbasis elektronika menuntut sumber daya aparatur untuk mampu mengikutinya;
9. Masih adanya ego sektoral/unit kerja di jajaran organisasi perangkat daerah/instansi terkait yang menjadi mitra kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Utara.
10. Tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan kinerja, profesionalisme yang bermuara pada pelayanan prima;
11. Pengaruh globalisasi yang meningkatkan peran-peran lembaga masyarakat, swasta dan masyarakat secara umum yang tidak lepas dari tipologi budaya, nilai-nilai, dan paradigma *kearifan lokal* masyarakat Sulawesi Utara terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan;
12. Meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terkait akan pentingnya pembangunan yang responsif gender;
13. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;

14. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, serta koordinasi pelaksanaannya.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD.

Kondisi internal dan dinamika perubahan lingkungan strategis sangat berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Berikut ini beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

Bidang Kesekretariatan

1. Anggaran yang berhubungan dengan gender relatif belum memadai;
2. Fasilitas sarana dan prasarana penunjang serta jumlah aparatur dengan kemampuan teknis dan penguasaan teknologi yang kurang memadai untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal khususnya dalam penanganan laporan/pengaduan kasus kekerasan perempuan dan anak;
3. Belum terbangunnya Sistem Informasi Manajemen melalui penerapan Teknologi Informasi;

Bidang Pengarusutamaan Gender, Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

4. Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi belum optimal;
5. Pengarusutamaan gender pelaksanaannya masih sangat terbatas;
6. Peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan masih rendah padahal mereka lebih membawa aspirasi masyarakat yang terkait dengan kesejahteraan;
7. Belum optimalnya penanganan kualitas keluarga
8. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender, dan perlindungan hak-hak perempuan.

Isu Strategis

Bidang Perlindungan hak Perempuan

9. Masih sering terjadi perdagangan perempuan (*women-trafficking*) dan kekerasan dalam rumah tangga;
10. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang perlindungan hak-hak perempuan.
11. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan perempuan
12. Belum semua kelompok rentan pada perempuan mendapat program pemberdayaan (lansia potensial, disabilitas perempuan, korban bencana alam perempuan)

Bidang Perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak

13. Belum optimalnya kabupaten/kota dalam perwujudan kab/kota layak anak
14. Belum optimalnya pelayanan perlindungan khusus pada anak
15. Masih ditemukannya kekerasan dan perdagangan pada anak
16. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pemenuhan hak anak

Bidang Partisipasi Masyarakat

17. Masih kurangnya peran masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18. Masih belum optimalnya peran PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Anak dalam mengembangkan jaringan kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

17.3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2010-2015 dan memperhatikan hasil telaahan visi dan misi sesuai dokumen Rancangan RPJMD 2016-2021, dimana Visi yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yaitu ***“Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari dalam ekonomi, Berdaulat dalam pemerintahan & politik, serta Berkepribadian***

dalam budaya” Berdasarkan Visi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 terdapat 3 (tiga) pokok visi yaitu :

1. Berdikari Dalam Ekonomi
2. Berdaulat Dalam Politik
3. Berkepribadian Dalam Budaya

Visi provinsi Sulawesi Utara dalam RPJMD 2016-2021 sebenarnya mengacu pada Trisakti yang diwujudkan dalam bentuk:

1. Berdikari dalam ekonomi diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warga negara

2. Kedaulatan dalam politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa..

3. Kepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Dalam konteks pembangunan regional di provinsi Sulawesi Utara penjabaran visi Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur DRS. Steven Kandouw telah menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*), sekaligus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah. Pengejawantahan pokok-pokok visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Ukuran Berdikari Dalam Ekonomi Ditunjukkan Oleh :

1. Kemampuan Masyarakat Sulawesi Utara Memenuhi Kebutuhan Dasar Baik Pangan, Sandang Maupun Papan Sebagai Bentuk Kemandirian Wilayah.

2. Kemampuan Menanggulangi Kemiskinan, Pengangguran Serta Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
3. Kemampuan Untuk Menjamin Pemberdayaan Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan Dan Kelautan Serta Pariwisata Sebagai Sumber Ketahanan Ekonomi Wilayah.
4. Kemampuan Untuk Membangun Sarana, Prasarana, Infrastruktur Yang Merata Dan Berkeadilan Dalam Koridor Ketahanan Lingkungan Hidup Menuju Pembangunan Berkelanjutan
5. Kemampuan Untuk Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Dan Pembiayaan Pembangunan Dan Mengoptimalkan Belanja Daerah Bersumber Dari Sumber Daya Lokal Sehingga Mengurangi Ketergantungan Sumber Daya Dari Daerah Lain.
6. Kemampuan Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif.
7. Kemampuan Memperkuat Perekonomian Domestik Berbasis Keunggulan Wilayah

Ukuran *Berdaulat Dalam Pemerintahan Dan Politik* Ditunjukkan Oleh:

1. Kemampuan Memastikan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Dan Kenyamanan Hidup Masyarakat Dalam Suasana Kerukunan Berdasarkan Falsafah Pancasila
2. Kemampuan Aparatur Sipil Negara Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Secara Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Sebagai Wujud Kedaulatan Dalam Pemerintahan
3. Kemampuan Pemerintah Menegakkan Peraturan Daerah, Mencegah Tindak Kriminalitas
4. Kemampuan Pemerintah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender Di Setiap Aspek Pembangunan
5. Kemampuan Pemerintah Dalam Mengelola Wilayah Kepulauan Dan Perbatasan
6. Kemampuan Pemerintah Membangun Jaringan Kerjasama Regional, Bilateral Dan Internasional Untuk Mendukung Peningkatan Kemampuan Daerah.
7. Kemampuan Pemerintah Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat

Ukuran Berkepribadian Dalam Budaya Ditunjukkan Oleh :

1. Kemampuan Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas, Cerdas Dan Sehat Serta Mampu Memiliki Daya Saing.
2. Kemampuan Masyarakat Menjaga Keragaman Dan Kekayaan Budaya Daerah.
3. Kemampuan Membangun Jati Diri Dan Karakter Bangsa Melalui Revolusi Mental Dalam Penyelenggaraan Hidup Bermasyarakat Dan Bernegara.
4. Kemampuan Membangun Dan Menjaga Warisan Tradisi Budaya Daerah Sulawesi Utara Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Dan Penghargaan Terhadap Jati Diri Masyarakat Minahasa, Bolaang Mongondow Dan Sangihe Talaud
5. Kemampuan Meningkatkan Penguasaan Dan Pemanfaatan Iptek Melalui Penelitian, Dan Pengembangan Menuju Inovasi Berkelanjutan.
6. Kemampuan Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan Dan Perlindungan Anak.
7. Kemampuan Meningkatkan Kapasitas, Watak Masyarakat Sulawesi Utara Dalam Pergaulan Internasional Sebagai Wujud Kesiapan Sulawesi Utara Sebagai Pintu Gerbang Internasional Di Kawasan Timur Indonesia.

Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi diarahkan untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi terwujudnya Sulawesi Utara yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam budaya. Sesuai dengan harapan "Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat dalam Politik dan Berkepribadian dalam Budaya" maka ditetapkan Misi Pembangunan Sulawesi Utara 2016-2021 sebagai berikut.

MISI PEMBANGUNAN:

- 1) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor pertanian dan sumberdaya kemaritiman serta mendorong sektor industri dan jasa
- 2) Memantapkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkepribadian dan berdaya saing.
- 3) Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai destinasi investasi dan pariwisata yang berdaya saing

- 4) Mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang adil, mandiri dan maju
- 5) Memantapkan pembangunan infrastruktur berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan
- 6) Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan timur

- 7) *Mewujudkan Sulawesi Utara yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik.*

Dari uraian Visi dan Misi tersebut, yang mendorong pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah mendukung pencapaian :

VISI :

Ukuran Berdikari Dalam Ekonomi Ditunjukkan Oleh :

2. Kemampuan Menanggulangi Kemiskinan, Pengangguran Serta Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
4. Kemampuan Untuk Membangun Sarana, Prasarana, Infrastruktur Yang Merata Dan Berkeadilan Dalam Koridor Ketahanan Lingkungan Hidup Menuju Pembangunan Berkelanjutan

Ukuran *Berdaulat Dalam Pemerintahan Dan Politik* Ditunjukkan Oleh:

4. Kemampuan Pemerintah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender Di Setiap Aspek Pembangunan

Ukuran Berkepribadian Dalam Budaya Ditunjukkan Oleh :

6. Kemampuan Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan Dan Perlindungan Anak.

MISI :

- 1) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor pertanian dan sumberdaya kemaritiman serta mendorong sektor industri dan jasa
- 2) Memantapkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkepribadian dan berdaya saing.
- 3) Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai destinasi investasi dan pariwisata yang berdaya saing
- 4) Mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang adil, mandiri dan maju
- 5) Memantapkan pembangunan infrastruktur berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan
- 6) Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan timur

Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari Dalam Ekonomi, Berdaulat Dalam Pemerintahan Dan Politik, Serta Berkepribadian Dalam Budaya

| Misi | Tujuan | Sasaran |
|---|---|--|
| Misi I : | | |
| Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor pertanian dan sumberdaya kemaritiman sebagai penjabaran provinsi kepulauan, serta mendorong sektor industri dan jasa. | 1.1 Meningkatkan kesejahteraan petani perkebunan, nelayan, IKM-UMKM, koperasi dan pelaku jasa masyarakat. | 1.1.1 Terwujudnya peningkatan produksi dan produktifitas komoditas pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan kelautan. |
| | 1.2 Mengoptimalkan pelayanan publik. | 1.2.1 Tersedianya aksesibilitas petani perkebunan, nelayan, pelaku IKM, UMKM dan koperasi terhadap pemanfaatan teknologi, sumber-sumber pembiayaan, serta informasi pasar dan akses pasar. |
| | 1.3 Meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan kelautan melalui usaha ekonomi kreatif. | 1.3.1. Mengembangkan industri pertanian, perkebunan dan kelautan berbasis sumber daya. |
| | 1.4 Peningkatan tata kelola laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan | 1.4.1. Terkelolanya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan Sulawesi Utara secara holistik, terpadu dan sinkron |
| Misi II : | | |
| Memantapkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkepribadian dan berdaya saing. | 2.1 Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas dan berdaya saing. | 2.1.1 Terwujudnya wajib belajar 12 tahun sesuai standar pelayanan minimal dan tersedianya kemudahan akses dan pembiayaan pendidikan tinggi. |
| | 2.2 Mewujudkan SDM yang sehat dengan derajat kesehatan dan gizi yang tinggi sebagai bagian dari upaya pencapaian sustainable development goals. | 2.2.1. Terkendalinya kematian ibu melahirkan dan kematian anak/balita. |
| | | 2.2.2. Terwujudnya akses kualitas pelayanan sesuai SPM kesehatan. |
| | | 2.2.3. Tersedianya SDM kesehatan/ tenaga medis yang berkompetensi dan professional. |
| | | 2.2.4. Terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang memiliki Usia Harapan Hidup yang panjang. |
| | 2.2.5. Terwujudnya ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang sesuai SPM kesehatan. | |

| | | |
|--|---|--|
| | | 2.2.6. Terintegrasinya pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Utara. |
| | | 2.2.7. Terwujudnya akses pelayanan kesehatan Sulawesi Utara yang berkualitas. |
| | 2.3 Memasyarakatkan dan membina olahraga dan meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan. | 2.3.1. Tercapainya prestasi di bidang keolahragaan dan kepemudaan. |
| | 2.4 Membentuk SDM yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. | 2.4.1. Terwujudnya harmoni social dan kerukunan umat beragama. |
| | 2.5 Memantapkan kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat. | 2.5.1. Terwujudnya masyarakat yang memiliki pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan hukum dan perundangan. |
| | 2.6 Memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Sulawesi Utara sebagai wujud revolusi mental DENGAN MENDORONG KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2.6.1. TERWUJUDNYA INTEGRASI NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA YANG MEMPERHATIKAN KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT SULAWESI UTARA SEBAGAI LANDASAN SPIRITUAL, MORAL, DAN ETIKA PEMBANGUNAN. |
| Misi III : | | |
| Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai destinasi investasi dan pariwisata yang berwawasan lingkungan. | 3.1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional di Sulawesi Utara. | 3.1.1 Terwujudnya peningkatan pertumbuhan investasi PMA/ PMDN dan pertumbuhan modal tetap bruto. |
| | 3.2 Meningkatkan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan pariwisata | 3.2.1. Terwujudnya pemanfaatan sektor pariwisata melalui peningkatan potensi dan akses pariwisata Sulawesi Utara yang berdaya saing. |
| Misi IV: | | |
| Mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang adil, mandiri dan maju. | 4.1 Mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan social serta sarana dan prasarana ekonomi untuk mendorong percepatan | 4.4.1 TERJAMINNYA KESETARAAN HAK ANAK DAN ANAK-ANAK PEREMPUAN, KESETARAAN GENDER SERTA PENINGKATAN JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PMKS |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>pencapaian sustainable development goals.</p> | |
| | <p>4.2 Meningkatkan keberpihakan kepada kelompok masyarakat miskin untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran dengan berpedoman pada strategi penanggulangan kemiskinan daerah ODSK (operasi daerah selesaikan kemiskinan) Provinsi Sulawesi Utara.</p> | <p>4.2.1. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran.</p> |
| | | <p>4.2.2. Terselurnya bantuan social dengan tepat sasaran dan tepat peruntukan.</p> |
| | <p>4.3 Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang professional dan berdaya saing dalam menghadapi kerjasama masyarakat ekonomi ASEAN.</p> | <p>4.3.1. Tersedianya tenaga kerja yang professional, kompeten dan produktif sesuai dinamika perkembangan ketenagakerjaan yang mampu bersaing dalam era kerjasama masyarakat ekonomi ASEAN.</p> |
| | <p>4.4 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan kepulauan dan kawasan perbatasan.</p> | <p>4.4.1. Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana serta kelembagaan custom, immigration, quarantine, security (CIQS) terpadu, meningkatkan kerjasama ekonomi, sosial budaya, serta aktivitas lintas Negara yang kondusif dan menguntungkan dengan Negara Republik Philipina.</p> |
| | | <p>4.4.2. Terwujudnya kemandirian ekonomi melalui pemberian akses yang merata ke sumber daya ekonomi bagi seluruh masyarakat, sejalan dengan pengembangan ekonomi berbasis maritime dengan penerapan doktrin poros maritime.</p> |
| | | |
| <p>Misi V :</p> | | |
| <p>Memantapkan pembangunan infrastruktur berlandaskan</p> | <p>5.1 Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penataan ruang.</p> | <p>5.1.1 Terwujudnya harmonisasi pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang/ wilayah antar provinsi dan kab/ kota.</p> |

| | | |
|---|--|--|
| prinsip pembangunan berkelanjutan. | 5.2 Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas melalui percepatan dan ketepatan pembangunan. | 5.2.1. Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas secara merata dan adil. |
| | 5.3 Melestarikan lingkungan hidup melalui upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan keanekaragaman hayati. | 5.3.1. Terwujudnya pelestarian lingkungan hidup dan adaptasi perubahan iklim. |
| | 5.4 Meningkatkan usaha pengendalian dan pengurangan resiko bencana. | 5.4.1. Terwujudnya kenyamanan hidup melalui penyelenggaraan penurunan resiko bencana. |
| Misi VI : | | |
| Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan timur. | 6.1 Mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah melalui pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. | 6.1.1 Terwujudnya Sulawesi Utara sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang kawasan timur Indonesia. |
| | 6.2 Mendorong peningkatan pendapatan masyarakat terhadap jasa pariwisata dan kemaritiman berorientasi internasional. | i. Terwujudnya pembangunan kemaritiman sebagai wujud Sulawesi Provinsi kepulauan. |
| | 6.3 Memantapkan kualitas pelayanan berorientasi global di Sulawesi Utara. | 6.3.1. Terjaminnya ketersediaan sarana dan prasarana berorientasi global dengan standar internasional di wilayah Sulawesi Utara. |
| Misi VII : | | |
| Mewujudkan Sulawesi Utara yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik. | 7.1 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. | 7.1.1. Peningkatan integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. |
| | 7.2 Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menuju wilayah taan administrasi dan wilayah bebas korupsi. | 7.2.1. Terwujudnya peningkatan kualitas reformasi birokrasi serta pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. |
| | 7.3 Meningkatkan konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan | 7.3.1. Terwujudnya konsistensi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. |
| | 7.4 Meningkatkan integritas aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik. | 7.4.1. Terselenggaranya pelayanan publik yang berdaya saing. |

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak mendukung misi 2 dan misi 3. Dalam mencapai misi tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki permasalahan dan faktor pendorong dan faktor penghambat sebagai berikut:

| No | Visi Misi RPJMD | Sasaran Jangka Menengah RPJMD | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Sebagai Faktor | |
|----|--|--|--|--|--|
| | | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Misi II Memantapkan Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berkepribadian Dan Berdaya Saing | Terwujudnya Integrasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Yang Memperhatikan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Kehidupan Masyarakat Sulawesi Utara Sebagai Landasan Spiritual, Moral, Dan Etika Pembangunan | <ul style="list-style-type: none"> • Belum semua perangkat daerah mampu mengintegrasikan komposit IPG dan IDG dalam dokumen perencanaan dan penganggaran | <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan |
| | Tujuan Memperkuat Jati Diri Dan Karakter Masyarakat Sulawesi Utara Sebagai Wujud Revolusi Mental Dengan Mendorong Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | | <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kelembagaan PUG dalam mengimplementasi PPRG • Masih kurangnya kapasitas SDM | | |
| 2 | | | <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, | <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga |

| No | Visi Misi RPJMD | Sasaran Jangka Menengah RPJMD | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Sebagai Faktor | |
|----|--|---|---|---|---|
| | | | | Penghambat | Pendorong |
| | | | menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. | | P2TP2A |
| | a. | b. Meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO | <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. | | |
| 3 | <p>Misi III</p> <p>MEWUJUDKAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG ADIL, MANDIRI DAN MAJU</p> <p>Tujuan</p> <p>Mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi untuk mendorong percepatan</p> | Terjaminnya Kesetaraan Hak Anak Dan Anak-Anak Perempuan, Kesetaraan Gender Serta Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Pmks | <ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak • Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman. | <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak |

| No | Visi Misi RPJMD | Sasaran Jangka Menengah RPJMD | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Sebagai Faktor | |
|----|--|-------------------------------|---|--|--|
| | | | | Penghambat | Pendorong |
| | pencapaian sustainable development goals. | | | | |
| | | | Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |

Adapun tujuan yang selaras dengan misi dimaksud adalah :

1. Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender;
2. Meningkatnya kompetensi dan peran perempuan di segala aras;
3. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak
4. Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak anak
5. Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan
6. Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak Lansia
7. Meningkatnya penguatan kelembagaan peduli perempuan dan anak

Sasaran yang hendak dicapai meliputi :

1. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua Aspek Pembangunan;
2. Terwujudnya kelompok usah/wiraswasta perempuan;
3. Terciptanya Kompetensi dan peran perempuan disegala aras;
4. Terlaksananya peningkatan kualitas perempuan dan anak

5. Terwujudnya Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak anak
6. Terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan
7. Terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak Lansia
8. Terlaksananya program pengawasan masyarakat terhadap perlindungan anak

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):
Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

- 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Sebagai Faktor | |
|----|--|---|--|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender | <ul style="list-style-type: none"> • Komposit IPG belum terintegrasi kedalam perencanaan kelembagaan | <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan |
| | b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender | <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan belum optimal dalam rangka mengarah pada pencapaian komposit IDG | | |
| 2 | c. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO | <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. | <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A |
| | d. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan | <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus | | |

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Sebagai Faktor | |
|----|--|---|--|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| | termasuk TPPO | <p>perlakuan buruk terhadap buruh migran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. | | |
| 3 | a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia. | <ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak | <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak |
| | b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak | | | |
| | c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak | | | |
| 4 | Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi dirumuskan sebagai terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah provinsi dalam perencanaan pembangunan demikian pula halnya dengan kajian lingkungan hidup strategis, diarahkan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah provinsi yang diharapkan untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah terutama untuk mewujudkan Misi:

1. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor pertanian dan sumberdaya kemaritiman serta mendorong sektor industri dan jasa
2. Memantapkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkepribadian dan berdaya saing.
3. Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai destinasi investasi dan pariwisata yang berdaya saing
4. Mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang adil, mandiri dan maju
5. Memantapkan pembangunan infrastruktur berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan
6. Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan timur
7. Mewujudkan Sulawesi Utara yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Sesuai dengan tugas dan fungsi PD maka salah satu peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulut adalah meningkatkan peran dan kualitas perempuan disegala aras dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi perempuan yang maju dan mandiri serta berkelanjutan di daerah dalam rangka *mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor pertanian dan sumberdaya kemaritiman serta mendorong sektor industri dan jasa serta Mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang adil, mandiri dan maju*, yang selanjutnya akan semakin meningkatkan kualitas ekonomi perempuan terutama di daerah perbatasan dan

promosi produk kerajinan dari pengrajin perempuan yang berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan ke Sulawesi Utara dalam rangka Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai destinasi investasi dan pariwisata yang berdaya saing. Selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulut memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan di Provinsi Sulawesi Utara guna mempersiapkan ketahanan diri termasuk didalamnya pengembangan mental dan sikap, serta peningkatan kapasitas perempuan diberbagai sektor dalam rangka *Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai destinasi investasi dan pariwisata yang berdaya saing*.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan perangkat daerah tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang”. Kecuali dengan mendorong OPD terkait dalam hal pemenuhan kab/kota layak anak dengan indikator pemanfaatan ruang dan kawasan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan memperhatikan analisis lingkungan internal dan eksternal, isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulut dalam Periode Renstra 2016-2021 mendatang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan PUG
2. Belum optimalnya pemberdayaan pada perempuan
3. Belum optimalnya kelembagaan perlindungan perempuan
4. Belum optimalnya pencegahan kekerasan dan perdagangan orang
5. Belum optimalnya komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam perwujudan kabupaten/kota layak anak
6. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pemenuhan hak anak

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, dan diupayakan terfokus pada *outcome*. Dalam menetapkan tujuan perlu diperhatikan nilai-nilai, lingkungan, dan faktor-faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan.

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai penjabaran dari Visi dan Misi RPJMD untuk periode Rencana Strategis 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Jati Diri Dan Karakter Masyarakat Sulawesi Utara Sebagai Wujud Revolusi Mental Dengan Mendorong Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak melalui :
 - a) Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 - b) Meningkatkan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
 - c) Meningkatkan pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak;
 - d) Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
2. Mengurangi Kesenjangan Sosial Secara Menyeluruh, Menyediakan Akses Yang Sama Bagi Masyarakat Terhadap Berbagai Pelayanan Sosial Serta Sarana Dan Prasarana Ekonomi Untuk Mendorong Percepatan Pencapaian Sustainable Development Goals melalui :
 - e) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Meningkatkan Konsistensi Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaksanaan Pembangunan Melalui Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender melalui :
 - f) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas PP&PA Prov. Sulut.

Indikator kinerja masing-masing tujuan merupakan Indikator Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah sebagai berikut :

| No | TUJUAN | Indikator Kinerja Utama (IKU) |
|----|--|-------------------------------|
| 1. | Memperkuat Jati Diri Dan Karakter Masyarakat Sulawesi Utara Sebagai Wujud Revolusi Mental Dengan Mendorong Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak melalui: (Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender) | |

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan
 - Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender
 - b. Meningkatnya kualitas hidup perempuan
2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.
 - Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:
 - a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
 - b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
3. Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus
 - Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak
 - b. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak
4. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Sasaran yang dicapai dari tujuan keempat meliputi sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya Lembaga Masyarakat yang terlibat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2016 - 2021

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja Sasaran | | | | | Target Akhir Renstra |
|----|---|---|---|--------|--------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| | | | | | Tahun 0 | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | |
| 1 | Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender | a. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek pembangunan | Meningkatnya indeks pembangunan gender IPG dan indeks pemberdayaan gender IDG | poin | 94,64 | 94,64 | 95,00 | 95,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
| | | | | poin | 79,82 | 79,82 | 79,82 | 79,82 | 79,85 | 79,85 | 79,85 |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja Sasaran | | | | | Target Akhir Renstra |
|----|--|--|--|-----------|--|------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| | | | | | Tahun 0 | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | |
| | | | % OPD implementasi PPRG | % | 8.9 | 33.3 | 44.4 | 55.6 | 77.8 | 100.00 | 100 |
| | | | Jumlah usaha perempuan terlatih | Jumlah | 120 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | | Jumlah kader parpol perempuan yang mendapatkan pendidikan politik | 360 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 360 |
| 2 | Meningkatkan perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan Dan TPPO. | a. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan TPPO | Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO | Per 1.000 | 94 Korban /788,3 11 Pddk Per x 100 =12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| | | b. Meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO | Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar. | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Meningkatnya lansia yang mendapat program pemberdayaan perempuan | Cakupan lansia yang mendapat program pemberdayaan perempuan | % | 0 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 3 | Meningkatkan Implementasi konsep kab/kota layak anak dan perlindungan pada anak. | a. Meningkatkan implementasi kabupaten/kota layak anak | % Kabupaten kota layak anak mendapat penghargaan (Pratama, Madya, Nidya, Utama) | % | 7 | 7 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| | | b. Meningkatkan kualitas implementasi perlindungan khusus kepada anak | Tersedianya profil kebutuhan khusus | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | Tersedianya profil perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Meningkatnya Lembaga Masyarakat yang terlibat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Cakupan Lembaga Masyarakat yang terlibat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | % | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |

Commented [U1]: Dihapus saja...ini output

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja Sasaran | | | | | Target Akhir Renstra | |
|----|--------|---------|---|--------|--------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|----|
| | | | | | Tahun 0 | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | | |
| | | | n Anak | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan Lembaga Masyarakat dan Organisasi Peduli Perempuan dan Anak, Dunia Usaha serta Media | Jumlah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |

2.1 Strategis dan kebijakan Strategi

Dalam upaya pencapaian Tujuan dan sasaran, maka perlu ditetapkan strategi sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Untuk mencapai tujuan di atas strategi yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan peran kelembagaan PUG Provinsi melalui evaluasi, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
2. Meningkatkan peran perguruan tinggi, dunia usaha dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui koordinasi dan jejaring kemitraan
3. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender
4. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.

Tujuan 2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan

1. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
2. Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
3. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah

4. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
5. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
6. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
7. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial.

Tujuan 3. Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

1. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.
3. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
4. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelebagaan kabupaten/kota layak anak.
5. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
6. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah.
7. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak.
8. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.

9. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.
10. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.
11. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak.

Tujuan 4. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang kerjasama dan penguatan kelembagaan;
2. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang data dan informasi gender dan anak;
3. Menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan; dan
4. Melakukan Penyusunan Grand Desain Perlindungan Perempuan dan Anak
5. Melakukan pembinaan dan fasilitasi organisasi perempuan
6. Updating data gender dan anak
7. Pelaksanaan System Data Terpilah, Statistik Gender dan Anak
8. Forum Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Kerjasama dengan dunia Usaha
10. Penyusunan Peraturan terkait Perlindungan Perempuan dan Anak
11. Menyelenggarakan Rakor Data Gender dan Anak

4.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pada tahun 2016-2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara telah merumuskan arah kebijakan dan strateginya pada bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan perlindungan anak.

Uraian arah kebijakan dan strategi pada ketiga bidang sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat pada bagian berikut ini:

A. Arah Kebijakan

1. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Arah kebijakan dalam bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan akan diprioritaskan pada:

- a. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, sebagai acuan bagi SKPD Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Organisasi dalam pelaksanaan strategi PUG;
- b. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada SKPD dan Pemda Kab/Kota;
- c. Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan implementasi PUG melalui pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan yang responsif gender di SKPD, Pemda, dan Organisasi.
- d. Menyusun data dan informasi terkait PUG dan Pemberdayaan Perempuan.
- e. Melakukan Fasilitasi, Advokasi dan Pembinaan Organisasi Perempuan,
- f. Mendorong peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan dalam pengembangan usaha kelompok perempuan

2. Perlindungan Hak Perempuan

Arah kebijakan dalam bidang perlindungan Hak perempuan akan diprioritaskan pada:

- a. Melakukan Penyusunan dan Perumusan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan
- b. Melakukan Penyusunan Data/Profil dan Survei terkait perlindungan perempuan dari tindak kekerasan
- c. Meningkatkan Kapasitas SDM tentang Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan dan SDM pelayanan dan pendampingan korban Kekerasan/KDRT
- d. Melaksanakan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) GT-TPPO
- e. Melakukan Sosialisasi Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan

3. Perlindungan Anak

Arah kebijakan dalam bidang perlindungan anak akan diprioritaskan pada:

- a. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk kebijakan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi SKPD terkait, Pemda dan Organisasi;
- b. Menyusun Profil Perlindungan Anak
- c. Meningkatkan Kapasitas SDM Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
- d. Melakukan Koordinasi Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak Secara Holistik dan Integaritif

- e. Mendorong Pengembangan kabupaten/kota layak anak
 - f. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan anak
 - g. Melakukan Kemitraan dan jejaring melalui Pemberdayaan lembaga yang berbasis Anak serta Sosialisasi yang terkait perlindungan anak
4. Pengembangan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Arah kebijakan dalam Pengembangan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak akan diprioritaskan pada:
- a. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)
 - b. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan dan Korban Traficking
 - c. Pembentukan sistim pelayanan satu pintu untuk penanganan anak korban kekerasan di P2TP2A Provinsi
 - d. Peningkatan Jejaring dan Kapasitas SDM pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)
5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat.
- a. Melakukan Kemitraan dan fasilitasi kerjasama dengan Organisasi dunia usaha dan lembaga yang berbasis Perlindungan Perempuan dan lembaga yang berbasis Anak
 - b. Menyusun Data dan Informasi terkait gender, pemberdayaan perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Hak Anak
 - c. Melakukan Kajian terkait Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan serta Kesejahteraan Anak
 - d. Melakukan Penyusunan Peraturan terkait Perlindungan Perempuan dan Anak

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan diuraikan sebagai berikut :

BAB V HARUS ADA NARASI SEPERTI INI

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

dengan kegiatan sbb. :

1. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
2. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan
3. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa
4. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian
5. Penataan Kearsipan
6. Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi / Konsultasi

II. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur,

dengan kegiatan sbb. :

1. Pengadaan Gedung Kantor DP3A
2. Pengadaan Gedung Kantor P2TP2A / Rumah Singgah
3. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
4. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
5. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
6. Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor
7. Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional
8. Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Kantor
9. Sewa Gedung Kantor

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur,

dengan kegiatan meliputi :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

IV. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan,

dengan kegiatan SBB. :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
2. Penyusunan LKIP
3. Penyusunan Renja
4. Penyusunan RKA
5. Penyusunan SOP
6. Penyusunan Renstra

V. Program Kesetaraan Gender & Pemberdayaan Perempuan,

dengan kegiatan meliputi :

1. Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan
2. Sosialisasi Program Nasional HE FOR SHE
3. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
4. Pelatihan Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsive Gender (PPRG)
5. Pelatihan & Bantuan Alat Ketrampilan serta Pendampingan bagi Kelompok Usaha Perempuan
5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

VI. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan,

dengan kegiatan meliputi :

1. Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera
2. Fasilitasi Temu Karya Lansia
3. Pelatihan Ketrampilan bagi Perempuan dengan Masalah Sosial
4. Fasilitasi Kegiatan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
5. Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP-TPPO)
6. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

VI. Program Perlindungan Khusus dan Pemenuhan Hak Anak,

dengan kegiatan meliputi :

1. Duta Wisata Hukum
2. Fasilitasi Forum Anak Nasional
3. Temu Kreatifitas Forum Anak Kabupaten
4. Rapat Koordinasi Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

5. Fasilitasi Kegiatan Gugus Tugas KLA
6. Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak
7. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Pengurus PUSPAGA
8. Fasilitasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
9. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

VIII. Program Pengembangan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ((P2TP2A),

dengan kegiatan sbb. :

1. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak
2. Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan P2TP2A
3. Fasilitasi pengembangan P2TP2A
4. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

XI. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat,

dengan kegiatan sbb :

1. Konsultasi dan Sinkronisasi Penyusunan Grand Design Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi Perempuan dan Anak (DW)
3. Forum Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Seminar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Program THREE ENDS)
5. Kampanye dan Jelajah Program "THREE ENDS"
6. Rapat Koordinasi Organisasi Perempuan dan Anak
7. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah
Kabupaten Tahun 2018 - 2023

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab | | |
|--|---|-------------------|--|---|--------|--------------|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|-------------------------------|----|
| | | | | | | | Tahun ke-1 | | Tahun ke-2 | | Tahun ke-3 | | Tahun ke-4 | | Tahun ke-5 | | | Target Akhir Renstra | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | target | Rp |
| Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan | Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender | IPG | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender | | | | | | | | | | | | | | | Bidang Pemberdayaan Perempuan | |
| | Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender | IDG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan | Jumlah Peserta Rakor PUG | orang | 60 | 60 | 100.000.000 | 60 | 100.000.000 | 60 | 100.000.000 | 60 | 100.000.000 | 60 | 500.000.000 | 300 | | |
| Tujuan 1 | Sasaran 2 | | Program | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan..... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dst | | | | | | | | | | | | | | | | |

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparaturnya perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021

| NO | Indikator | Satuan | Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2016) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2021) |
|----|--|--------|--|--|--------|--------|--------|--------|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | Target | Target | Target | Target | Target | |
| 12 | Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui : | | | | | | | | |
| | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Skor | 94,64 | 94,64 | 95,00 | 95,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
| | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Skor | 79,82 | 79,82 | 79,82 | 79,82 | 79,85 | 79,85 | 79,85 |
| | % OPD implementasi PPRG | % | 8.9 | 33.3 | 44.4 | 55.6 | 77.8 | 100.00 | 100 |
| | Jumlah kader parpol perempuan yg mendapatkan pendidikan politik | Jumlah | 360 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| | Jumlah usaha perempuan terlatih | Jumlah | 120 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13 | Meningkatnya upaya perlindungan hak perempuan melalui : | | | | | | | | |
| | Cakupan korban kekerasan perempuan yang mendapat pelayanan sesuai standar | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Commented [U1]: INI DIHAPUS SAJA MASUKKAN INDIKATOR Program bab 5, karena ini sifatnya out put kalo mau diganti adalah %perempuan dalam legeslatif

Commented [U2]: INI DIHAPUS SAJA MASUKKAN INDIKATOR Program bab 5, karena ini sifatnya out put kalo mau diganti adalah %kontribusi pendapatan perempuan dalam rumah tangga (komposit IDG)

| | | | | | | | | | |
|----|---|--------|-----|------|------|------|------|------|-------|
| | Jumlah lansia Produktif/taangguh mendapat program pemberdayaan perempuan | Jumlah | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,500 |
| | Jumlah SDM terlatih tentang pelayanan pendampingan korban kekerasan | Jumlah | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 |
| | Ratio Kekerasan dalam rumah tangga | % | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| 14 | Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus, dan perlindungan anak melalui : | | | | | | | | |
| | % Kabupaten kota layak anak mendapat penghargaan (Pratama, Madya, Nidya, Utama) | % | 0 | 7 | 7 | 20 | 20 | 40 | 40 |
| | Jumlah kab/kota menuju kabupaten/kota layak anak | Jumlah | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| | Jumlah kab/kota pembentukan kelembagaan anak | Jumlah | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| 15 | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak melalui : | | | | | | | | |
| | % Pelayanan terhadap perempuan dan anak korban yang mendapatkan pelayanan sesuai standar | % | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |
| 16 | Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui : | | | | | | | | |
| | Cakupan Lembaga Masyarakat yang terlibat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | % | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| | Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan Lembaga Masyarakat dan Organisasi Peduli Perempuan dan Anak, Dunia Usaha serta Media | Jumlah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |

BAB VII P E N U T U P

7.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Tahun 2016-2021 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2016-2021 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2005 - 2025.

7.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah tahun 2016-2021. yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Manado, Mei 2016

KEPALA DINAS

Ir. MIEKE PANGKONG, MSi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610519 198602 2 002

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pemberayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulut

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pemberayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Sulawesi Utara

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|------------|------------|--------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan | | | | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | Jumlah kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik | | | | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | | |
| 3 | Jumlah SKPD/Kab/Kota/LM yang mendapat sosialisasi tentang KKG, PP dan PA | | | | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | | |
| 4 | Jumlah kab/kota yang di monitoring dan evaluasi mengenai program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan | | | | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | | |
| 5 | Jumlah jejaring kemitraan yang difasilitasi dan advokasi PUG | | | | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | | |
| 6 | Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi untuk pembentukan P2TP2A | | | | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | | |

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|--|------------|------------|--------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 7 | Jumlah Sosialisasi ke kab/kota tentang pemetaan potensi oraginsasi dan LM Jumlah dokumen/buku profil pemetaan potensi organisasi dan LM | | | | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | | |
| 8 | Jumlah produk (leaflet, brosur, buku saku) tentang KKG | | | | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | | |
| 9 | Jumlah Kab/Kota yang membentuk Pokja PUG | | | | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | | |
| 10 | Jumlah Kab/Kota/LM peduli perempuan dan anak | | | | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | | |
| 11 | Jumlah kab/kota yang dievaluasi pelaksanaan PUG | | | | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | | |
| 12 | Jumlah kab/kota yang memiliki sistem informasi Gender dan Anak | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 13 | Jumlah kab/kota yang di monitoring dan evaluasi Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | | | | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | | |
| 14 | Jumlah kebijakan perlindungan perempuan di daerah | | | | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | | |

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|------------|------------|--------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 15 | Jumlah kegiatan kader terlatih dalam hal pelayanan dan pendampingan korban KDRT | | | | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | | |
| 16 | Jumlah sosialisasi sistem perlindungan bagi perempuan Jumlah Kab/Kota yang memiliki sistem perlindungan | | | | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | | |
| 17 | Jumlah SKPD/LM/Kab/Kota yang mendapat sosialisasi/advokasi penghapusan buta aksara perempuan (PBAP) | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 18 | Jumlah jaringan usaha yang mendapat sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan | | | | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | | |
| 19 | Jumlah LM/Kab/Kota/UPPA yang mendapat sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT Jumlah LM/Kab/Kota yang memiliki sistem pencatatan dan pelaporan KDRT | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|------------|------------|--------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 20 | Jumlah buku profil perlindungan perempuan lansia dan cacat | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 21 | Jumlah kegiatan fasilitasi perlindungan perempuan tindak kekerasan | | | | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | | |
| 22 | Jumlah kab/kota yang di monitoring dan evaluasi Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | | | | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | | |
| 23 | Jumlah organisasi perempuan yang dibina | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 24 | Jumlah SKPD/Kab/Kota yang mendapat pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender | | | | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | | |
| 25 | Jumlah kegiatan untuk kelompok Ibu Rumah Tangga yang mendapat penyuluhan membangun keluarga sejahtera | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 26 | Jumlah kelompok usaha perempuan yang mendapat bimbingan manajemen usaha | | | | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | | |

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|------------|------------|--------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 27 | Jumlah hasil karya perempuan dalam pameran | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 28 | Jumlah kab/kota yang di monitoring dan evaluasi Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 29 | Jumlah SKPD/Kab/Kota/LM yang mengikuti workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 30 | Jumlah kerja sama dengan SKPD/LM berbasis gender | | | | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | | |

Tabel 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI UTARA

| NO | URAIAN | ANGGARAN PADA TAHUN KE- | | | | | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- | | | | | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE | | | | | RATA-RATA PERTUMBUHAN | |
|----|------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|
| | | (01) 2005 | (02) 2006 | (03) 2007 | (04) 2008 | (05) 2009 | (01) 2005 | (02) 2006 | (03) 2007 | (04) 2008 | (05) 2009 | (01) 2005 | (02) 2006 | (03) 2007 | (04) 2008 | (05) 2009 | ANGGA RAN | REALIS ASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | SUMBER PEMBIAYAAN APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - BELANJA LANGSUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PALAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI UTARA

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|----|---|--|---|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender | Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua Aspek pembangunan | Meningkatnya partisipasi perempuan di jabatan politik | 30 % | 35 % | 40 % | 45 % | 50 % |
| 2 | Meningkatnya kesejahteraan dan perekonomian kelompok-kelompok usaha perempuan | Terwujudnya kelompok usaha perempuan (woman local entrepreneur) | Meningkatnya jumlah kelompok usaha perempuan yang dibimbing | 1 kelompok usaha perempuan | 2 kelompok usaha perempuan | 5 kelompok usaha perempuan | 7 kelompok usaha perempuan | 12 kelompok usaha perempuan |
| 3 | Meningkatnya kompetensi dan peran perempuan di segala aras | Terciptanya Kompetensi dan peran perempuan disegala aras | Meningkatnya partisi perempuan dalam jabatan publik | 20 % | 30 % | 40 % | 45 % | 50 % |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|---|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 4 | Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak anak | Terwujudnya Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak anak | Meningkatnya layanan dan fasilitas penanganan kasus anak | 25 kasus | 35 kasus | 45 kasus | 55 kasus | 65 kasus |
| 5 | Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan | Terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan | Meningkatnya layanan dan fasilitas penanganan kasus perempuan | 25 kasus | 35 kasus | 45 kasus | 55 kasus | 65 kasus |
| 6 | Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak Lansia | Terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak Lansia | Meningkatnya fasilitas jaminan perlindungan hak-hak lansia | 2 paket/ 2 Kab-kota | 3 paket/ 3 Kab-kota | 4 paket/ 4 Kab-kota | 5 paket/ 5 Kab-kota | 6 paket/ 6 Kab-kota |
| NO | T U J U A N | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 6 | Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak | Terlaksananya peningkatan kualitas perempuan dan anak | Meningkatnya peran dan partisipasi perempuan di jabatan publik | 1 kegiatan | 2 kegiatan | 3 kegiatan | 4 kegiatan | 4 kegiatan |
| 7 | Meningkatnya fungsi dan peran kelembagaan peduli perempuan dan anak | Terlaksananya program pengawasan masyarakat terhadap | Jumlah kelembagaan masyarakat yang peduli anak yang difasilitasi | 3 lembaga | 4 lembaga | 5 lembaga | 6 lembaga | 7 lembaga |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | perlindungan anak | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|

Manado, mei 2016

KEPALA BADAN

IR. ERNI B. TUMUNDO, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA

TABEL 4.2
STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI UTARA

| NO | T U J U A N | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN |
|-----------|--------------------|----------------|-----------------|------------------|
|-----------|--------------------|----------------|-----------------|------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|----|---|--|--|---|
| 1. | Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender | Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua Aspek pembangunan | Pemantapan kesetaraan gender dalam semua aspek pembangunan | Memperkuat kesetaraan gender dalam semua aspek pembangunan |
| 2 | Meningkatnya kesejahteraan dan perekonomian kelompok-kelompok usaha perempuan | Terwujudnya kelompok usaha perempuan (woman local entrepreneur) | Penciptaan dan pengembangan kelompok usaha perempuan | Mendorong upaya pembentukan jiwa kewirausahaan di kalangan kelompok usaha perempuan serta mendorong pengembangan kegiatan usaha perempuan dalam mengakselerasikan pembangunan ekonomi perempuan di daerah dan peningkatan kesejahteraan |
| 3 | Meningkatnya kompetensi dan peran perempuan di segala aras | Terciptanya Kompetensi dan peran perempuan disegala aras | Peningkatan kompetensi dan peran perempuan di segala aras | Mendorong dan mengembangkan upaya meningkatkan kompetensi dan peran perempuan disegala aras untuk meningkatkan kesetaraan gender di Sulawesi Utara; |
| 4 | Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak anak | Terwujudnya Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak anak | Peningkatan upaya Perlindungan terhadap hak-hak anak | Berperan aktif untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak |
| | T U J U A N | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN |
| | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak | Terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan | Peningkatan upaya Perlindungan terhadap hak-hak perempuan | Mendorong dan memfasilitasi institusi-institusi yang terlibat aktif dalam perlindungan hak-hak perempuan |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| | perempuan | | | |
| 6 | Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak Lansia | Terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak Lansia | Perlindungan terhadap hak-hak Lansia. | Berperan aktif untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak lansia |
| 7 | Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak | Terlaksananya peningkatan kualitas perempuan dan anak | Peningkatan kualitas perempuan dan anak | Mendorong dan memfasilitasi institusi-institusi yang terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak |
| 8 | Meningkatnya penguatan kelembagaan peduli perempuan dan anak | Terlaksananya program pengawasan masyarakat terhadap perlindungan anak | Pengembangan serta pemantapan program pengawasan masyarakat terhadap perlindungan anak | Berperan aktif melakukan perlindungan anak |

Manado, mei 2016

KEPALA BADAN

IR. ERNI B. TUMUNDO, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA

**TABEL INDIKATOR KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI UTARA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

| NO | INDIKATOR KINERJA | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD |
|----|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| | | Tahun 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Jumlah Aparatur SKPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pembangunan yang responsif gender | 80 Aparatur | 80 Aparatur | 120 Aparatur | 120 Aparatur | 120 Aparatur | 120 Aparatur | 120 Aparatur |
| 2. | Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) | 30% | 30% | 30% | 35% | 35% | 35% | 40% |
| 3. | Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%) | 32,10% | 33% | 34% | 35% | 36% | 36% | 36% |
| 4. | Porprosi Kursi parlemen yang diduduki perempuan | 23% | 23% | 23% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 5. | Jumlah kader parpol perempuan yg | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | mendapatkan pendidikan politik | | | | | | | |
| 6. | Jumlah Usaha Perempuan terlatih | 120 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7. | Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan perlindungan perempuan | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 8. | Jumlah SDM terlatih tentang Pelayanan Pendampingan Korban Kekerasan | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 9 | Ratio Kekerasan dalam rumah tangga | 0.4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| 10 | Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pembangunan yang responsif perlindungan anak | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Jumlah Kabupaten/Kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | perlindungan Anak | | | | | | | |
| 13 | Jumlah Kab/Kota Pembentukan kelembagaan Anak | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 80% |
| 16 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 80% |
| 17 | Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Manado, Juli 2011
KEPALA BADAN

Dra. MINTJE E. PALAPA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19570705 198403 2 006

Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI UTARA

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | No. Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) OutPut | Kondisi Indikator Awal Periode RPJMD 2010 | Target Capaian setiap tahun | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2015) | Unit SKPD Penanggung jawab | |
|---|--|--|----------|---|--|---|-------------------------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|---|----------------------------|--------|
| | | | | | | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |
| | | | | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SULUT | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender | Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek pembangunan | Meningkatnya Pemahaman KKG, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak | | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | Terselenggaranya peran Serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan | Jumlah organisasi perempuan, Lembaga Masyarakat | 3 Organisasi/le | BAB VII-18 3 Organisasi/le 60 | | 4 Organisasi/le 14 | | 4 Organisasi/le 22 | | 5 Organisasi/le 27 | | 5 Organisasi/le 37 | | | | Bidang |

| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|--|--|---|--|---|---|-------------------|-------------------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|---------------|-------------|
| Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara | Meningkatkan kompetensi dan peran perempuan di segala aras | Terciptanya kompetensi dan peran perempuan di segala aras | Meningkatkan partisipasi keterwakilan Perempuan di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik | Jumlah Workshop Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik | 1 Kegiatan 40 org | 2 Kegiatan 200 org | 240 | 3 Kegiatan 300 org | 340 | 4 Kegiatan 400 org | 419 | 5 Kegiatan 500 org | 576 | 6 Kegiatan 600 org | 680 | | Bidang PKHP |
| | | | | Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan | Jumlah Sosialisasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan | 1 kali 30 orang | BAB VII-20 2 kali 60 orang | 150 | 2 kali 75 orang | 215 | 4 kali 75 orang | 264 | 4 kali 80 orang | 363 | 4 kali 100 orang | 428 | 17 kali orang | Bidang PKHP |

| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|--|--|---|-----|--|---|------------|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|------|------|--------------------------|
| <i>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara</i> | | | | Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | Pelaksanaan Sosialisasi Rencana Strategis 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara | 1 | 1 | | 2 | 120 | 3 | 165 | 3 | 195 | 4 | 225 | 14 | Bidang Perlindungan Anak |
| | | | | | Fasilitasi Forum Anak Daerah | Kegiatan | Kegiatan | 52 | | | | | | | | | | |
| | | | | Peningkatan kapasitas & Jaringan kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan anak | Jumlah Kegiatan Advokasi Pembentukan Kota Layak Anak Kab/Kota | 0 | 2 kali 2 Kab/ Kota | 65 | 3 kali 3 Kab/ Kota | 150 | 3 kali 3 Kab/ Kota | 206 | 4 kali 4 Kab/ Kota | 244 | 5 kali 5 Kab/ Kota | 282 | | Bidang Perlindungan Anak |
| Meningkatnya kesejahteraan dan perekonomian kelompok usaha perempuan | Terwujudnya peningkatan kelompok usaha perempuan yang maju dan mandiri | Meningkatnya keterampilan perempuan dalam mengelola usaha guna menunjang ekonomi keluarga | | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha | Jumlah Kelompok usaha perempuan yang dibina | 1 Kelompok | 2 Kelompok | 100 | 5 Kelompok | 210 | 7 Kelompok | 375 | 9 Kelompok | 460 | 12 Kelompok | 575 | 26 | 26 Kelompok |

| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|--|--|---|--|--|---|----------------------------|----------------------------|-----|----------------------------|-----|----------------------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|----------------------|-------------------------------|
| <i>Dinas Pembinaan Perencanaan dan Koordinasi Anus dan Provinsi Sulawesi Utara</i> | Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan | Terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan | Meningkatkan koordinasi kebijakan perlindungan perempuan di daerah | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | <i>Rencana Strategis 2016-2021</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Penyusunan system Perlindungan bagi perempuan | Jumlah Kegiatan Pembentukan Gugus Tugas PPTPPO Kab/Kota | 1 kegiatan | 1 kegiatan 1 Kab/kota | 47 | 2 kegiatan 2 Kab/kota | 117 | 3 kegiatan 3 Kab/kota | 172 | 4 kegiatan 4 Kab/kota | 203 | 5 kegiatan 5 Kab/kota | 250 | 16 Kegiatan Kab/Kota | Bidang Perlindungan Perempuan |
| | | | | Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap Tindak kekerasan | Jumlah kegiatan fasillitasi perempuan korban kekerasan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 75 | 2 kegiatan | 186 | 3 kegiatan | 273 | 4 kegiatan | 322 | 4 kegiatan | 396 | 15 Kegiatan | Bidang Perlindungan Perempuan |
| | | | | Sosialisasi dan advokasi Kebijakan perlindungan Tenaga kerja | Jumlah Sosialisasi perlindungan tenaga kerja | 1 kali 30 orang 1 Kab/Kota | 1 kali 30 orang 1 Kab/Kota | 55 | 3 kali 30 orang 3 Kab/Kota | 136 | 3 kali 30 orang 3 Kab/Kota | 200 | 3 kali 30 orang 3 Kab/Kota | 236 | 4 kali 30 orang 4 Kab/Kota | 290 | 15 kali 15 Kab/Kota | Bidang Perlindungan Perempuan |

Manado, Juli 2011
KEPALA BADAN

BAB VII-25

Dra. MINTJE E. PALAPA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19570705 198403 2 006

| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |
|---|--|---|---|--|--|------------|--------------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-------------|--------------------------|---------------------|
| <i>Dinas Pembinaan Perempuan dan Anak</i> | Meningkatnya kualitas pelayanan perempuan dan anak | Terlaksananya peningkatan kualitas perempuan dan anak | Meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang PUG menuju KKG | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | <i>Rencana Strategis Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara</i> | | <i>2016-2021</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak | Jumlah Buku Profil Gender | 50 Buku | 50 Buku | 35 | 100 Buku | 81 | 100 Buku | 112 | 150 Buku | 132 | 200 Buku | 152 | 50 Buku | Bidang Perlindungan Anak | |
| | | | | Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan | Jumlah Pokja PUG yang dibentuk di Kab/Kota | 1 kegiatan | 1 kegiatan 1 Kab/Kota | 50 | 2 kegiatan 2 Kab/Kota | 115 | 3 kegiatan 3 Kab/Kota | 158 | 4 kegiatan 4 Kab/Kota | 186 | 4 kegiatan 4 Kab/Kota | 215 | 14 Kegiatan | Bidang PKHP | |
| | | | | Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) | Jumlah Buku Profil Perlindungan Anak | 0 | 100 Buku | 50 | 200 Buku | 115 | 250 Buku | 158 | 250 buku | 186 | 300 Buku | 215 | | | Bidang PKHP |
| | | | | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah kegiatan | 1 kegiatan | BAB VII-26 1 kegiatan | 50 | 2 kegiatan | 115 | 3 kegiatan | 158 | 4 kegiatan | 187 | 4 kegiatan | 215 | 15 Kegiatan | | Bidang Perlindungan |

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 s.d 2021

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode Rekening | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan/Kon dis Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2016) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2021) | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | | | |
|---|---|--|-------------------|--|--|---|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|---|--------------------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | | | | | |
| | | | | | | | Target | Rupiah | Target | Rupiah | Target | Rupiah | Target | Rupiah | Target | Rupiah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | |
| | | | 1.11.1.11.1.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; NILAI LKIP SKPD Dinas PEREMPUAN DAN PERLINDUNAN ANAK RATA - RATA MINIMUM B | NILAI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD Dinas PEREMPUAN DAN PERLINDUNAN ANAK RATA - RATA MINIMUM B | 790,000,000.00 | | NILAI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD Dinas PEREMPUAN DAN PERLINDUNAN ANAK RATA - RATA MINIMUM B | 790,000,000.00 | NILAI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD Dinas PEREMPUAN DAN PERLINDUNAN ANAK RATA - RATA MINIMUM B | 790,000,000.00 | NILAI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD Dinas PEREMPUAN DAN PERLINDUNAN ANAK RATA - RATA MINIMUM B | 790,000,000.00 | NILAI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD Dinas PEREMPUAN DAN PERLINDUNAN ANAK RATA - RATA MINIMUM B | 790,000,000.00 | NILAI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD Dinas PEREMPUAN DAN PERLINDUNAN ANAK RATA - RATA MINIMUM B | | | | | |
| Meningkatnya pelayanan administrasi DPP-PAD | Tersedianya kebutuhan administrasi umum | Penyediaan kebutuhan administrasi umum | 1.11.1.11.1.01.01 | Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum | Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum | 12 Bulan | 12 Bulan | 300,000,000.00 | 12 Bulan | 300,000,000.00 | 12 Bulan | 300,000,000.00 | 12 Bulan | 300,000,000.00 | 12 Bulan | 300,000,000.00 | 12 Bulan | 300,000,000.00 | 48 Bulan | | | |
| Meningkatnya pelayanan administrasi DPP-PAD | Tersedianya kebutuhan administrasi keuangan | Penyediaan kebutuhan administrasi keuangan | 1.11.1.11.1.01.02 | Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan | Tersedianya Kebutuhan Administrasi Keuangan | 12 Bulan | 12 Bulan | 125,000,000.00 | 12 Bulan | 125,000,000.00 | 12 Bulan | 125,000,000.00 | 12 Bulan | 125,000,000.00 | 12 Bulan | 125,000,000.00 | 12 Bulan | 125,000,000.00 | 48 Bulan | | | |
| Meningkatnya pelayanan administrasi DPP-PAD | Tersedianya kebutuhan administrasi barang/jasa | Penyediaan kebutuhan administrasi barang/jasa | 1.11.1.11.1.01.03 | Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa | Tersedianya Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa | 12 Bulan | 12 Bulan | 50,000,000.00 | 12 Bulan | 50,000,000.00 | 12 Bulan | 50,000,000.00 | 12 Bulan | 50,000,000.00 | 12 Bulan | 50,000,000.00 | 12 Bulan | 50,000,000.00 | 48 Bulan | | | |
| Meningkatnya pelayanan administrasi DPP-PAD | Penyusunan laporan bulanan evaluasi kinerja dan disiplin PNS DPP-PAD | Penyusunan laporan bulanan evaluasi kinerja dan disiplin PNS DPP-PAD | 1.11.1.11.1.01.04 | Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian | Tersedianya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian | 12 Bulan | 12 Bulan | 15,000,000.00 | 12 Bulan | 15,000,000.00 | 12 Bulan | 15,000,000.00 | 12 Bulan | 15,000,000.00 | 12 Bulan | 15,000,000.00 | 12 Bulan | 15,000,000.00 | 48 Bulan | | | |
| Meningkatnya pelayanan administrasi DPP-PAD | Meningkatnya koordinasi dan konsultasi | Tersedianya kegiatan koordinasi and konsultasi ke luar daerah | 1.11.1.11.1.01.06 | Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 1 Tahun | 1 Tahun | 300,000,000.00 | 1 Tahun | 300,000,000.00 | 1 Tahun | 300,000,000.00 | 1 Tahun | 300,000,000.00 | 1 Tahun | 300,000,000.00 | 1 Tahun | 300,000,000.00 | 5 Tahun | | | |
| | | | 1.11.1.11.1.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; NILAI LKIP SKPD Dinas PEREMPUAN DAN PERLINDUNAN ANAK RATA - RATA MINIMUM B | NILAI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD Dinas PEREMPUAN DAN PERLINDUNAN ANAK RATA - RATA MINIMUM B | 937,000,000.00 | | NILAI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD Dinas PEREMPUAN DAN PERLINDUNAN ANAK RATA - RATA MINIMUM B | 750,000,000.00 | NILAI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD Dinas PEREMPUAN DAN PERLINDUNAN ANAK RATA - RATA MINIMUM B | 750,000,000.00 | NILAI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD Dinas PEREMPUAN DAN PERLINDUNAN ANAK RATA - RATA MINIMUM B | 600,000,000.00 | NILAI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD Dinas PEREMPUAN DAN PERLINDUNAN ANAK RATA - RATA MINIMUM B | 600,000,000.00 | NILAI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD Dinas PEREMPUAN DAN PERLINDUNAN ANAK RATA - RATA MINIMUM B | | | | | |
| Membancarkan Tugas-tugas kedinasan | Terpeliharanya kendaraan dinas | Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua | 1.11.1.11.1.02.05 | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional | 1 Kendaraan Dinas Roda Empat dan 2 Kendaraan Roda Dua | 1 Kendaraan Dinas Roda Empat dan 2 Kendaraan Roda Dua | 500,000,000.00 | 1 Kendaraan Dinas Roda Empat | 200,000,000.00 | 1 Kendaraan Dinas Roda Empat | 200,000,000.00 | 1 Kendaraan Dinas Roda Dua | 50,000,000.00 | 1 Kendaraan Dinas Roda Dua | 50,000,000.00 | 1 Kendaraan Dinas Roda Empat dan 4 Kendaraan Roda Dua | 3 Kendaraan Dinas Roda Empat dan 4 Kendaraan Roda Dua | | | | |
| Meningkatnya Kelancaran Tugas-tugas kedinasan | Terpeliharanya peralatan/perengkapan gedung kantor | Terpeliharanya peralatan/perengkapan gedung kantor | 1.11.1.11.1.02.07 | Pengadaan peralatan/perengkapan gedung kantor | Jumlah Peralatan/perengkapan gedung Kantor | 14 Jenis Perengkapan/Peralatan | 14 Jenis Perengkapan/Peralatan | 250,000,000.00 | 14 Jenis Perengkapan/Peralatan | 250,000,000.00 | 14 Jenis Perengkapan/Peralatan | 250,000,000.00 | 14 Jenis Perengkapan/Peralatan | 250,000,000.00 | 14 Jenis Perengkapan/Peralatan | 250,000,000.00 | 14 Jenis Perengkapan/Peralatan | 14 Jenis Perengkapan/Peralatan | 14 Jenis Perengkapan/Peralatan | | | |
| | | | 1.11.1.11.1.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya Gedung Kantor secara Rutin dan Secara berkala | 12 Bulan | 12 Bulan | 12,000,000.00 | 12 Bulan | 50,000,000.00 | 12 Bulan | 50,000,000.00 | 12 Bulan | 50,000,000.00 | 12 Bulan | 50,000,000.00 | 12 Bulan | 50,000,000.00 | 48 Bulan | | | |
| | | | 1.11.1.11.1.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terpeliharanya kendaraan Operasional/Dinas secara Rutin dan Secara berkala | 13 Unit Kendaraan | 13 Unit Kendaraan | 125,000,000.00 | 13 Unit Kendaraan | 125,000,000.00 | 13 Unit Kendaraan | 125,000,000.00 | 13 Unit Kendaraan | 125,000,000.00 | 13 Unit Kendaraan | 125,000,000.00 | 13 Unit Kendaraan | 125,000,000.00 | 13 Unit Kendaraan | 13 Unit Kendaraan | | |
| | | | 1.11.1.11.1.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perengkapan gedung kantor | Terpeliharanya Peralatan/Perengkapan Gedung Kantor secara Rutin dan Secara berkala | 12 Bulan | 12 Bulan | 50,000,000.00 | 12 Bulan | 125,000,000.00 | 12 Bulan | 125,000,000.00 | 12 Bulan | 125,000,000.00 | 12 Bulan | 125,000,000.00 | 12 Bulan | 125,000,000.00 | 48 Bulan | | | |
| | | | | Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor | Terpeliharanya Peralatan/Perengkapan Gedung Kantor secara Rutin dan Secara berkala | 0 | Gedung P2Tp2A dan Pameran | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terciptanya keseragaman berpakaian Pegawai DPP-PA | Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya | 1.11.1.11.1.03 | Program peningkatan disiplin aparatur | Prosentase ASN Perangkat Daerah yang tidak dikenai sanksi disiplin | 95% | 95% | 55,000,000.00 | 95% | 55,000,000.00 | 95% | 55,000,000.00 | 95% | 55,000,000.00 | 95% | 55,000,000.00 | 95% | 55,000,000.00 | 95% | | | |
| | | | 1.11.1.11.1.03.02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah Orang/Stel | 42 Stel/Orang | 42 Stel/Orang | 30,000,000.00 | 42 Stel/Orang | 30,000,000.00 | 42 Stel/Orang | 30,000,000.00 | 42 Stel/Orang | 30,000,000.00 | 42 Stel/Orang | 30,000,000.00 | 42 Stel/Orang | 30,000,000.00 | 42 Stel/Orang | 42 Stel/Orang | | |
| | | | 1.11.1.11.1.03.05 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Jumlah Orang/Stel | 42 Stel/orang | 42 Stel/orang | 25,000,000.00 | 42 Stel/orang | 25,000,000.00 | 42 Stel/orang | 25,000,000.00 | 42 Stel/orang | 25,000,000.00 | 42 Stel/orang | 25,000,000.00 | 42 Stel/orang | 25,000,000.00 | 42 Stel/orang | 42 Stel/Orang | | |
| Meningkatnya Pengetahuan PNS | Teraksanannya Sosialisasi peraturan perundang-undangan | Sosialisasi peraturan perundang-undangan | 1.11.1.11.1.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA SKPD BP3A (NILAI LKIP SKPD Dinas PEREMPUAN DAN PERLINDUNAN ANAK RATA - RATA MINIMUM B) | NILAI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD Dinas PEREMPUAN DAN PERLINDUNAN ANAK RATA - RATA MINIMUM B | 130,000,000.00 | | NILAI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD Dinas PEREMPUAN DAN PERLINDUNAN ANAK RATA - RATA MINIMUM B | 130,000,000.00 | NILAI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD Dinas PEREMPUAN DAN PERLINDUNAN ANAK RATA - RATA MINIMUM B | 130,000,000.00 | NILAI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD Dinas PEREMPUAN DAN PERLINDUNAN ANAK RATA - RATA MINIMUM B | 130,000,000.00 | NILAI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD Dinas PEREMPUAN DAN PERLINDUNAN ANAK RATA - RATA MINIMUM B | 130,000,000.00 | NILAI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD Dinas PEREMPUAN DAN PERLINDUNAN ANAK RATA - RATA MINIMUM B | | | | | |
| Meningkatnya PNS yang terampil dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan kinerja DPP-PA | Teraksanannya keikutsertaan dalam kegiatan bimtek dalam dan luar daerah | Teraksanannya keikutsertaan bimtek dalam dan luar daerah | 1.11.1.11.1.05.01 | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah Aparatur BPP-PA yang mengikuti Pendidikan | 1 Paket | 1 Paket | 75,000,000.00 | 1 Paket | 75,000,000.00 | 1 Paket | 75,000,000.00 | 1 Paket | 75,000,000.00 | 1 Paket | 75,000,000.00 | 1 Paket | 75,000,000.00 | 5 Paket | | | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode Rekening | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan/Kon diisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2016) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2021) | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|---|---|--|-------------------|---|---|---|--|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|---|---|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | | |
| | | | | | | | Target | Rupiah | Target | Rupiah | Target | Rupiah | Target | Rupiah | Target | Rupiah | | | |
| | | | 1.11.1.11.1.05.02 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan | Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan | 45 Orang | 45 Orang | 25,000,000.00 | 45 Orang | 25,000,000.00 | 45 Orang | 25,000,000.00 | 45 Orang | 25,000,000.00 | 45 Orang | | | | |
| | | | 1.11.1.11.1.05.03 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah Bimtek yang dilaksanakan dan diikuti | 45 Orang | 45 Orang | 30,000,000.00 | 45 Orang | 30,000,000.00 | 45 Orang | 30,000,000.00 | 45 Orang | 30,000,000.00 | 45 Orang | | | | |
| Meningkatkan Kualitas Kinerja DPP-PA dan Sebagai Bahan Evaluasi Penyusunan Kebijakan kegiatan mendatang | | | 1.11.1.11.1.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan | 100% dari 42 Laporan (LKIP, LAPORAN TAHUNAN, LPPD SKPD, LKPJ SKPD, 12 Laporan Bulanan, 12 Laporan fungsional bendahara, Laporan semesteran, 12 Laporan EPRA) | 100% dari 42 Laporan (LKIP, LAPORAN TAHUNAN, LPPD SKPD, LKPJ SKPD, 12 Laporan Bulanan, 12 Laporan fungsional bendahara, Laporan semesteran, 12 Laporan EPRA) | 30,000,000.00 | 100% dari 42 Laporan (LKIP, LAPORAN TAHUNAN, LPPD SKPD, LKPJ SKPD, 12 Laporan Bulanan, 12 Laporan fungsional bendahara, Laporan semesteran, 12 Laporan EPRA) | 30,000,000.00 | 100% dari 42 Laporan (LKIP, LAPORAN TAHUNAN, LPPD SKPD, LKPJ SKPD, 12 Laporan Bulanan, 12 Laporan fungsional bendahara, Laporan semesteran, 12 Laporan EPRA) | 30,000,000.00 | 100% dari 42 Laporan (LKIP, LAPORAN TAHUNAN, LPPD SKPD, LKPJ SKPD, 12 Laporan Bulanan, 12 Laporan fungsional bendahara, Laporan semesteran, 12 Laporan EPRA) | 30,000,000.00 | 100% dari 42 Laporan (LKIP, LAPORAN TAHUNAN, LPPD SKPD, LKPJ SKPD, 12 Laporan Bulanan, 12 Laporan fungsional bendahara, Laporan semesteran, 12 Laporan EPRA) | | | | |
| | Tersedianya laporan keuangan semesteran | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan khsitar realisasi | 1.11.1.11.1.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan khsitar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang tersusun | 5 Jenis Laporan/Dokumen | 5 Jenis Laporan/Dokumen | 10,000,000.00 | 5 Jenis Laporan/Dokumen | 10,000,000.00 | 5 Jenis Laporan/Dokumen | 10,000,000.00 | 5 Jenis Laporan/Dokumen | 10,000,000.00 | 5 Jenis Laporan/Dokumen | | | | |
| | Laporan Keuangan Semesteran | Tersedianya laporan keuangan semesteran DPP-PA Prov. Sult | 1.11.1.11.1.06.02 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun | 1 Laporan Semesteran | 1 Laporan Semesteran | 10,000,000.00 | 1 Laporan Semesteran | 10,000,000.00 | 1 Laporan Semesteran | 10,000,000.00 | 1 Laporan Semesteran | 10,000,000.00 | 1 Laporan Semesteran | | | | |
| | Tersedianya laporan keuangan dan kinerja | Tersusunnya laporan Akhir Tahun | 1.11.1.11.1.06.04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah dokumen Laporan yang tersusun | 2 Jenis Dokumen | 2 Jenis Dokumen | 10,000,000.00 | 2 Jenis Dokumen | 10,000,000.00 | 2 Jenis Dokumen | 10,000,000.00 | 2 Jenis Dokumen | 10,000,000.00 | 2 Jenis Dokumen | | | | |
| Meningkatkan sistem Perencanaan yang Terbik untuk kelancaran tugas DPP-PA | | | 1.11.1.11.1.09 | Program Perencanaan SKPD | 100% dari total 12 dokumen perencanaan (Rancangan Awal Renstra SKPD 2016-2021, Rancangan Renstra SKPD 2016-2021, Rancangan Akhir Renstra SKPD 2016-2021, Renstra SKPD 2016-2021, Rancangan Perubahan SKPD 2016-2021, Rancangan Awal Renja SKPD, Rancangan Renja SKPD, Rancangan Akhir Renja SKPD, Rancangan Perubahan SKPD, RKA, RKA Perubahan) | 100% dari total 12 dokumen perencanaan (Rancangan Awal Renstra SKPD 2016-2021, Rancangan Renstra SKPD 2016-2021, Rancangan Akhir Renstra SKPD 2016-2021, Renstra SKPD 2016-2021, Rancangan Perubahan SKPD 2016-2021, Rancangan Awal Renja SKPD, Rancangan Renja SKPD, Rancangan Akhir Renja SKPD, Rancangan Perubahan SKPD, RKA, RKA Perubahan) | 100% dari total 7 dokumen perencanaan (Rancangan Awal Renstra SKPD 2018, Rancangan Renja SKPD 2018, Rancangan Akhir Renja SKPD 2018, Renja SKPD 2018, Renja Perubahan SKPD 2017, RKA 2018, RKA Perubahan 2017) | 95,000,000.00 | 100% dari total 11 dokumen perencanaan (Rancangan Awal Renstra SKPD 2016-2021, Rancangan Perubahan SKPD 2016-2021, Rancangan Awal Renja SKPD 2016-2021, Rancangan Renja SKPD 2016-2021, Rancangan Akhir Renja SKPD 2016-2021, RKA 2018, RKA Perubahan 2019) | 95,000,000.00 | 100% dari total 7 dokumen perencanaan (Rancangan Awal Renja SKPD 2020, Rancangan Renja SKPD 2020, Rancangan Akhir Renja SKPD 2020, Renja SKPD 2020, Renja Perubahan SKPD 2019, RKA 2020, RKA Perubahan 2019) | 95,000,000.00 | 100% dari total 7 dokumen perencanaan (Rancangan Awal Renja SKPD 2021, Rancangan Renja SKPD 2021, Rancangan Akhir Renja SKPD 2021, Renja SKPD 2021, Renja Perubahan SKPD 2020, RKA 2021, RKA Perubahan 2020) | 95,000,000.00 | 100% dari total 11 dokumen perencanaan (Rancangan Awal Renja SKPD 2021, Rancangan Renja SKPD 2021, Rancangan Akhir Renja SKPD 2021, Renja SKPD 2021, Renja Perubahan SKPD 2021, RKA 2021, RKA Perubahan 2021, Rancangan Awal Renstra SKPD 2021-2026, Rancangan Renstra SKPD 2021-2026, Rancangan Akhir Renstra SKPD 2021-2026, Renstra SKPD 2021-2026,) | 100% (43 DOKUMEN PERENCANAAN yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD) | | | |
| | Tersedianya Rencana Strategis SKPD | Tersusunnya Rencana Strategis SKPD | 1.11.1.11.1.09.01 | Penyusunan Rencana Strategis SKPD | Jumlah Dokumen yang tersusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 60,000,000.00 | 1 Dokumen | 60,000,000.00 | 1 Dokumen | 60,000,000.00 | 1 Dokumen | 60,000,000.00 | 1 Dokumen | 5 Dokumen | | | |
| | Tersedianya Rencana Kerja SKPD | Tersusunnya Rencana Kerja SKPD | 1.11.1.11.1.09.02 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | Jumlah Dokumen yang tersusun | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 25,000,000.00 | 2 Dokumen | 25,000,000.00 | 2 Dokumen | 25,000,000.00 | 2 Dokumen | 25,000,000.00 | 2 Dokumen | 25,000,000.00 | | | |
| | Tersedianya Rencana Kerja SKPD | Tersusunnya Rencana Kerja SKPD | 1.11.1.11.1.09.03 | Penyusunan Rencana Kerja Anggaran | Jumlah Dokumen yang tersusun | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10,000,000.00 | 2 Dokumen | 10,000,000.00 | 2 Dokumen | 10,000,000.00 | 2 Dokumen | 10,000,000.00 | 2 Dokumen | 10,000,000.00 | | | |
| Meningkatkan Kesenjangan dan Keadilan Gender | Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua Aspek pembangunan | Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | | Program Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Meningkatnya % OPD implementasi PPRG | 9 | 33 | 1,250,000,000 | 44 | 1,690,000,000 | 56 | 2,770,000,000 | 78 | 2,400,000,000 | 100 | 3,105,000,000 | | | |
| | | | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pelatihan tentang Penguatan Gender (PUG) | Jumlah SDM terlatih dan Fasilitas terlatih tentang PUG bidang hukum, Infrastruktur, IPTEK, Pendidikan, Kesehatan, sumberdaya Alam dan Lingkungan, Ketenagakerjaan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agribisnis serta Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan, Provinsi/Kab/kota, dan Ormas | 0 | 100 Orang | 65,000,000 | 150 | 100,000,000 | 200 | 125,000,000 | 200 | 125,000,000 | 200 | 125,000,000 | 850 Orang | | |
| | | | | Training of Fasilitator PUG | Jumlah Fasilitator terlatih tentang PUG bidang hukum, Infrastruktur, IPTEK, Pendidikan, Kesehatan, sumberdaya Alam dan Lingkungan, Ketenagakerjaan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agribisnis serta Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan, Provinsi/Kab/kota, dan Ormas | 0 | 50 Orang | 85,000,000 | 50 Orang | 85,000,000 | 50 Orang | 85,000,000 | 50 Orang | 85,000,000 | 50 Orang | 90,000,000 | 250 Orang | | |
| | | | | Evaluasi pelaksanaan PUG | Jumlah Kegiatan/Dokumen | 0 | 1 Kegiatan / 100 ORANG | 50,000,000 | 1 Kegiatan / 100 ORANG | 60,000,000 | 1 Kegiatan / 100 ORANG | 60,000,000 | 1 Kegiatan / 100 ORANG | 60,000,000 | 1 Kegiatan / 100 ORANG | 60,000,000 | 1 Kegiatan / 100 ORANG | | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode Rekening | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan/Kon diasi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2016) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2021) | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|--|---|---|---------------|---|--|---|---|---------------|----------------------------|---------------|---|----------------|---|----------------|--|---------------|---|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | | |
| | | | | | | | Target | Rupiah | Target | Rupiah | Target | Rupiah | Target | Rupiah | Target | Rupiah | | | |
| | | | | Pelatihan penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) | Jumlah Kegiatan | 80 Aparatur Perencana | 90 Aparatur Perencana | 50,000,000 | 60 Aparatur Perencana | 80,000,000 | 80 Aparatur Perencana | 150,000,000 | 80 Aparatur Perencana | 150,000,000 | 80 Aparatur Perencana | 150,000,000 | 80 Aparatur Perencana | | |
| | | | | Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera | Jumlah Kegiatan/Orang | 0 | 900 Orang/Ibu Rumah Tangga | 250,000,000 | 300 Orang/Ibu Rumah Tangga | 250,000,000 | Manado, Bolmong, Bitung, Minahasa, Tomohon, Kotamobaru | 650,000,000 | Bitung, Minut, Bolmut, Sitaro, Boltim (2800 Orng) | 600,000,000 | Manado, Bolmong, Minahasa, Talaud, Boljol, Sangihe (3000 Orng) | 675,000,000 | 95000 Orang | | |
| | | | | Pelatihan ketrampilan bagi perempuan dan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha | Jumlah Kegiatan/Orang | 0 | 300 Orang | 300,000,000 | 300 Orang | 500,000,000 | Manado, Bitung, Minisei, Minut, Tomohon, Sitaro (1200 Orng) | 900,000,000 | Manado, Minahasa, Minut, Bolmut, talaud, Boljol (1200 Orng) | 900,000,000 | Manado, Bolmong, Bitung, Minisei, Minahasa, Minut, Mitra | 1,200,000,000 | 4600 Orang | | |
| | | | | Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan | Jumlah Kegiatan | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 150,000,000 | 3 Kegiatan | 315,000,000 | 3 Kegiatan | 320,000,000 | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 325,000,000 | 3 Kegiatan | | |
| | | | | Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan | Jumlah Kegiatan/Orang | 300 Orang | 200 Orang | 100,000,000 | 200 Orang | 100,000,000 | 200 Orang | 280,000,000 | 200 Orang | 280,000,000 | 200 Orang | 280,000,000 | 200 Orang | | |
| | | | | Kampanye (HiFoStGe) Peran Serta Laki-Laki Terhadap Pengarusutamaan Gender | Jumlah Kegiatan | 0 | 750 ORG | 150,000,000 | 750 ORG | 150,000,000 | 500 Orang | 150,000,000 | 500 Orang | 150,000,000 | 500 Orang | 150,000,000 | 3000 Orang | | |
| | | | | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah Kabupaten dan Kota /Dokumen | 8 Kab/kota | 15 Kab/Kota | 50,000,000 | 15 Kab/kota | 50,000,000 | 15 Kab/Kota | 50,000,000 | 15 Kab/Kota | 50,000,000 | 15 Kab/Kota | 50,000,000 | 15 Kab/Kota | | |
| Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan | Terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan | Rasio perempuan korban kekerasan termasuk TPPO per 1000 perempuan | | Program Perlindungan Hak Perempuan | Meningkatnya upaya perlindungan hak perempuan melalui : Cakupan korban kekerasan perempuan yang mendapat pelayanan sesuai standar | | 100% | 825,000,000 | 100% | 1,450,000,000 | 100% | 1,802,500,000 | 100% | 2,020,000,000 | 100% | 2,460,000,000 | 100% | | |
| | | | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Dukungan Kegiatan Jambore Lansia | Jumlah Orang | 0 | 100 Orang | 25,000,000 | 100 Orang | 25,000,000 | 150 Orang | 37,500,000 | 200 Orang | 50,000,000 | 250 | 65,000,000 | 800 Orang | | |
| | | | | Temu Karya Lansia | Jumlah Orang | 0 | 300 Orang | 150,000,000 | 300 Orang | 150,000,000 | 400 Orang | 200,000,000 | 425 Orang | 225,000,000 | 450 Orang | 250,000,000 | 450 Orang | | |
| | | | | Pelatihan Ketrampilan bagi perempuan dengan masalah sosial | Jumlah Orang | 0 | 100 Orang | 150,000,000 | 100 Orang | 150,000,000 | 50 Orang | 220,000,000 | 50 Orang | 220,000,000 | 50 Orang /3 Kegiatan | 285,000,000 | 400 Orang | | |
| | | | | Pelatihan Ketrampilan bagi perempuan Korban kekerasan dan TPPO | Jumlah Orang | 0 | 100 Orang | 150,000,000 | 100 Orang | 150,000,000 | 50 Orang | 220,000,000 | 50 Orang | 220,000,000 | 50 Orang /3 Kegiatan | 285,000,000 | 250 Orang | | |
| | | | | Pelatihan Petugas Pendampingan Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan | Jumlah SDM terlatih tentang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan | 0 | 40 Orang /1 Kali | 100,000,000 | 40 Orang /1 Kali | 100,000,000 | 50 Orang | 220,000,000 | 50 Orang | 220,000,000 | 50 Orang /3 Kegiatan | 285,000,000 | 230 Orang | | |
| | | | | Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang | Jumlah SDM terlatih tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Sulawesi Tengah | 0 | 1 Kegiatan/100 Orang | 50,000,000 | 1 Kegiatan/100 Orang | 50,000,000 | 2 Kegiatan/100 Orang | 100,000,000 | 2 Kegiatan/100 Orang | 100,000,000 | 3 Kegiatan/100 Orang | 150,000,000 | 400 Orang | | |
| | | | | Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) G. Talaud | Jumlah Kegiatan/Orang | 2 Kegiatan/100 Orang | 2 Kegiatan/100 Orang | 150,000,000 | 2 Kegiatan/100 Orang | 150,000,000 | 3 Kegiatan/100 Orang | 200,000,000 | 3 Kegiatan/100 Orang | 150,000,000 | 2 Kegiatan/100 Orang | 150,000,000 | 400 Orang | | |
| | | | | Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban Kekerasan/KDRT | Jumlah SDM terlatih tentang Pelayanan Pendampingan Korban Kekerasan | 30 Orang | 2 Kegiatan/100 Orang | 150,000,000 | 2 Kegiatan/100 Orang | 150,000,000 | 2 Kegiatan/100 Orang | 150,000,000 | 2 Kegiatan/100 Orang | 175,000,000 | 2 Kegiatan/100 Orang | 250,000,000 | 500 Orang | | |
| | | | | Fasilitasi Peran Kemitraan pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan | Jumlah kesepakatan bersama antara DP3AD dengan PD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan | 0 | 5 dokumen | 30,000,000 | 10 dokumen | 60,000,000.00 | 15 dokumen | 90,000,000.00 | 20 dokumen | 120,000,000.00 | 20 dokumen | | | | |
| | | | | Penyusunan lembaga jejaring penanganan perempuan korban kekerasan dan TPPO | Jumlah lembaga peduli perempuan dan anak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pendampingan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pendampingan | Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pendampingan | | 100 orang | 50,000,000 | 100 orang | 50,000,000 | 120 orang | 75,000,000.00 | 150 orang | 100,000,000.00 | 470 Orang | | | | |
| | | | | Penyusunan database lansia perempuan | Jumlah lansia perempuan | | 1 kegiatan | 150,000,000 | | | | | | | 1 Kegiatan | | | | |
| | | | | Pelatihan keterampilan bagi lansia perempuan | Jumlah lansia perempuan yang memiliki keterampilan | | 100 orang | 200,000,000 | 100 orang | 200,000,000 | 150 orang | 300,000,000.00 | 150 orang | 300,000,000.00 | 400 Orang | | | | |
| | | | | Advokasi hukum waris bagi lansia perempuan | Jumlah lansia perempuan yang memahami hukum waris | | 100 orang | 45,000,000 | 100 orang | 45,000,000 | 150 orang | 70,000,000.00 | 150 orang | 70,000,000.00 | 150 Orang | | | | |
| | | | | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah Kegiatan/Kab/Kota | 8 kab/Kota | 15 Kab/Kota | 50,000,000 | 15 Kab/Kota | 50,000,000 | 15 Kab/Kota | 100,000,000 | 15 Kab/Kota | 125,000,000 | 15 Kab/Kota | 150,000,000 | 15 Kab/Kota | | |
| Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak anak | Terwujudnya Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak anak | Persentase kabupaten/kota Layak Anak | | Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak | Meningkatnya Jumlah Kab/Kota yang menerapkan Indikator Pemenuhan Hak Anak | 0 | 7 | 1,530,000,000 | 7 | 1,605,000,000 | 20 | 2,470,000,000 | 20 | 2,675,000,000 | 40 | 2,850,000,000 | 40 | | |
| | | | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Penyusunan Profil Anak berkebutuhan Khusus (ABK) | Jumlah dokumen profil Perlindungan bagi anak berhadapan dengan hukum, Pendidikan, Hak Sipil, Masalah Sosial, Kesehatan, Partisipasi Anak, dan Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai | 0 | 1 Dokumen | 30,000,000 | 1 Dokumen | 30,000,000 | 1 Dokumen | 70,000,000 | 1 Dokumen | 100,000,000 | 1 Dokumen | 1,000,000,000 | 5 Dokumen | | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode Rekening | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan/Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2016) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2021) | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi |
|---|--|---|---------------|---|---|---|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | | |
| | | | | | | | Target | Rupiah | Target | Rupiah | Target | Rupiah | Target | Rupiah | Target | Rupiah | | | |
| | | | | Pelatihan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak | Jumlah Kegiatan dan SDM terlatih tentang Perlindungan bagi anak berhadapan dengan hukum, Pendidikan, Hak Sipil, Masalah Sosial, Kesehatan, Partisipasi Anak, dan Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur (PNNL), good parenting serta serta kekerasan terhadap anak dan Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas | 0 | 200 Orang | 100,000,000 | 200 Orang | 100,000,000 | 200 Orang | 125,000,000 | 200 Orang | 150,000,000 | 200 Orang | 175,000,000 | 500 Orang | | |
| | | | | Pembentukan Kabupaten/kota layak anak | Jumlah kegiatan fasilitasi Pengembangan kabupaten/kota layak anak | 0 | 3 Kabupaten/Kota | 500,000,000 | 3 Kabupaten/Kota | 500,000,000 | 3 Kabupaten/Kota | 500,000,000 | 3 Kabupaten/Kota | 500,000,000 | 3 Kabupaten/Kota | 500,000,000 | 6 Kab/kota | | |
| | | | | Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) | Jumlah Orang | 0 | 75 Orang | 150,000,000 | 300 Orang | 150,000,000 | 75 Orang | 150,000,000 | 75 Orang | 150,000,000 | 75 Orang | 150,000,000 | 375 Orang | | |
| | | | | Fasilitasi Forum Anak Daerah | Jumlah Kegiatan Kelembagaan Anak/Forum Anak Daerah, Forum Anak Daerah, Kongres Anak Indonesia, Forum Anak Nasional | 1 Kegiatan | 3 Kegiatan | 250,000,000 | 3 Kegiatan | 250,000,000 | 3 Kegiatan | 300,000,000 | 3 Kegiatan | 300,000,000 | 3 Kegiatan | 400,000,000 | 3 Kegiatan | | |
| | | | | Temu Kreatifitas Forum Anak Daerah | Jumlah Kegiatan/Orang | 1 Kegiatan | 200 Orang | 150,000,000 | 200 Orang | 150,000,000 | 200 Orang | 200,000,000 | 200 Orang | 250,000,000 | 200 Orang | 250,000,000 | 1000 Orang | | |
| | | | | Pengembangan Perlindungan Anak yang Holistik dan Integratif (PALIATIF) | Jumlah Orang /kelompok | 4 Kelompok (4 Kab/Kota) | 200 Orang | 75,000,000 | 200 Orang | 150,000,000 | 200 Orang | 200,000,000 | 200 Orang | 250,000,000 | 200 Orang | 200 Orang | 1000 Orang | | |
| | | | | Fasilitasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) | Terasiliasinya | 0 | 12 bulan | 150,000,000 | 12 bulan | 150,000,000 | 12 bulan | 250,000,000 | 12 bulan | 300,000,000 | 12 bulan | 300,000,000 | 48 Bulan | | |
| | | | | Rapat Koordinasi Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum | Jumlah Kegiatan | 2 Kegiatan/100 Orang | 2 Kegiatan/100 Orang | 75,000,000 | 2 Kegiatan/100 Orang | 75,000,000 | 2 Kegiatan/100 Orang | 75,000,000 | 2 Kegiatan/100 Orang | 75,000,000 | 2 Kegiatan/100 Orang | 75,000,000 | 2 Kegiatan/100 Orang | | |
| | | | | Pelatihan Sstem Peradilan Anak (SPA) | Jumlah Orang | 60 Orang | | | | | 75 Orang | 150,000,000 | 75 Orang | 150,000,000 | 75 Orang | 150,000,000 | 285 Orang | | |
| | | | | Pelatihan Sekolah Ramah Anak (SRA) | Jumlah Orang | 60 Orang | | | | | 75 Orang | 150,000,000 | 75 Orang | 150,000,000 | 75 Orang | 150,000,000 | 285 Orang | | |
| | | | | Pelatihan Puskesmas Ramah Anak (PRA) | Jumlah Orang | 60 Orang | | | | | 75 Orang | 150,000,000 | 75 Orang | 150,000,000 | 75 Orang | 150,000,000 | 285 Orang | | |
| | | | | Percepatan Pemilikan Akte Anak | Jumlah Orang/Anak | | | | | | 75 Orang | 150,000,000 | 75 Orang | 150,000,000 | 75 Orang | 150,000,000 | 285 Orang | | |
| | | | | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah Kegiatan/Kab/Kota | 8 Kab/kota | 15 Kab/Kota | 50,000,000 | 15 Kab/kota | 50,000,000 | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak secara Terpadu | Terwujudnya Kelembagaan Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak secara Terpadu | Jumlah Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan | | Program Pengembangan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak | Meningkatnya Layanan pada Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak melalui % Pelayanan terhadap perempuan dan anak korban yang mendapatkan pelayanan sesuai standar melalui % Pelayanan terhadap perempuan dan anak korban yang mendapatkan pelayanan sesuai standar | 75% | 100% | 1,050,000,000 | 100% | 1,390,000,000 | 100% | 1,420,000,000 | 100% | 1,115,000,000 | 100% | 1,120,000,000 | 100% | | |
| | | | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) | Jumlah Kegiatan | 12 Bulan | 12 Bulan | 650,000,000 | 12 Bulan | 650,000,000 | 12 Bulan | 650,000,000 | 12 Bulan | 650,000,000 | 12 Bulan | 650,000,000 | 48 Bulan | | |
| | | | | Rapat Koordinasi dengan jejaring P2TP2A | Jumlah Kegiatan/Orang | 0 | 2 Kegiatan/100 Orang | 50,000,000 | 2 Kegiatan/100 Orang | 50,000,000 | 2 Kegiatan/100 Orang | 50,000,000 | 2 Kegiatan/100 Orang | 50,000,000 | 2 Kegiatan/100 Orang | 50,000,000 | 10 Kegiatan | | |
| | | | | Pelatihan Pengurus P2TP2A | Jumlah Kegiatan/Orang | 0 | 2 Kegiatan/100 Orang | 75,000,000 | 2 Kegiatan/100 Orang | 75,000,000 | 2 Kegiatan/100 Orang | 75,000,000 | 2 Kegiatan/100 Orang | 75,000,000 | 2 Kegiatan/100 Orang | 75,000,000 | 10 Kegiatan | | |
| | | | | Penanganan dan upaya perlindungan perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan dan Korban Trafficking | Jumlah Kegiatan/Kasus/ Orang | 131 Orang/Kasus | 120 Orang | 225,000,000 | 120 Orang | 225,000,000 | 120 Orang | 225,000,000 | 120 Orang | 225,000,000 | 120 Orang | 225,000,000 | 600 Orang | | |
| | | | | Pengembangan sistem aplikasi layanan laporan online | aplikasi layanan laporan online | | | | 1 kegiatan | 30,000,000 | 1 kegiatan | 30,000,000 | | | | | 2 Kegiatan | | |
| | | | | Pemeliharaan sistem aplikasi layanan laporan online | terpeliharanya sistem aplikasi layanan laporan online | | | | 12 bulan | 30,000,000 | 12 bulan | 35,000,000 | 12 bulan | 40,000,000 | 12 bulan | 45,000,000 | 48 Bulan | | |
| | | | | Advokasi tentang lembaga pengaduan P2TP2A dan aplikasi online | Jumlah Kegiatan/Orang | | | | 15 Kab/Kota | 250,000,000 | 15 Kab/Kota | 250,000,000 | | | | | 15 Kab/kota | | |
| | | | | Penyusunan SOP di P2TP2A | Tersusunnya SOP di P2TP2A | | | | 1 dokumen | 30,000,000 | 1 dokumen | 30,000,000 | | | | | 2 Dokumne | | |
| | | | | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah Kegiatan/Kab/Kota | | | | 15 Kab/Kota | 50,000,000 | 15 Kab/Kota | 75,000,000 | 15 Kab/Kota | 75,000,000 | 15 Kab/Kota | 75,000,000 | 15 Kab/Kota | | |

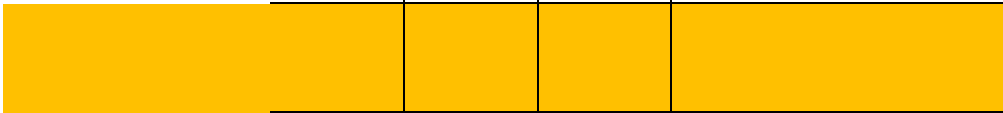
| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode Rekening | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan/Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2016) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2021) | Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab | Lokasi | |
|--|---------|---|---------------|--|--|---|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---|----------------------------------|--------|--|
| | | | | | | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | | | |
| | | | | | | | Target | Rupiah | Target | Rupiah | Target | Rupiah | Target | Rupiah | Target | Rupiah | | | | |
| Meningkatnya penguatan kelembagaan peduli perempuan dan anak | | Jumlah Fasilitas Kerjasama dengan Lembaga Masyarakat dan Organisasi Peduli Perempuan dan Anak | | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat | Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui : Cakupan Lembaga Masyarakat yang terlibat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 28 | 28 | 1,650,000,000 | 28 | 2,375,000,000 | 28 | 2,950,000,000 | 28 | 3,200,000,000 | 28 | 3,375,000,000 | 28 | | | |
| | | | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Penyusunan Grand Desain Perlindungan Perempuan dan Anak | Jumlah kebijakan terkait perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan | | | | 1 Kebijakan | 150,000,000 | 1 Kebijakan | 200,000,000 | 1 Kebijakan | 225,000,000 | 2 Kebijakan | 250,000,000 | 2 Kebijakan | | | |
| | | | | Penyusunan Kebijakan Perlindungan Pemenuhan bagi Hak Anak | Jumlah Kebijakan Perlindungan bagi anak berhadapan dengan hukum, Pendidikan, Hak Sipil, Masalah Sosial, Kesehatan, Partisipasi Anak, dan Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai | | | | 1 Dokumen | 100,000,000 | 1 Dokumen | 150,000,000 | 1 Dokumen | 200,000,000 | 2 Dokumen | 225,000,000 | 2 Dokumen | | | |
| | | | | Penyusunan Kebijakan Pengarusutamaan gender di segala aras bidang pembangunan yang reponsif gender | Jumlah kebijakan bidang hukum, Infrastruktur, IPTEK, Pendidikan, Kesehatan, sumberdaya Alam dan lingkungan, Ketenagakerjaan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis serta Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan yang serta politik dan pengambilan keputusan disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi | | | | 1 Kebijakan | 100,000,000 | 1 Kebijakan | 150,000,000 | 1 Kebijakan | 200,000,000 | 1 Kebijakan | 225,000,000 | 1 Kebijakan | | | |
| | | | | Kegiatan pembinaan dan fasilitasi organisasi perempuan | Jumlah Kegiatan/Orang | | | 2 Kegiatan/3 Organisasi | 500,000,000 | 2 Kegiatan/3 Organisasi | 500,000,000 | 2 Kegiatan/3 Organisasi | 500,000,000 | 2 Kegiatan/3 Organisasi | 500,000,000 | 2 Kegiatan/3 Organisasi | 500,000,000 | 2 Kegiatan/3 Organisasi | | |
| | | | | Updating data gender dan anak dan Pengelolaan Website P3A (e-government dan Simfoni) | Jumlah kebijakan terkait data gender dan anak | | | 1 Dokumen | 200,000,000 | 1 Dokumen | 200,000,000 | 1 Dokumen | 225,000,000 | 1 Dokumen | 225,000,000 | 1 Dokumen | 250,000,000 | 5 Dokumen | | |
| | | | | Pelatihan System Data Terpisah, Statistik Gender dan Anak | Jumlah SDM terlatih tentang system data terpisah, statistik gender dan anak | | | 1 Kegiatan 50 Orang | 150,000,000 | 1 Kegiatan 50 Orang | 150,000,000 | 1 Kegiatan 50 Orang | 200,000,000 | 1 Kegiatan 50 Orang | 200,000,000 | 1 Kegiatan 50 Orang | 225,000,000 | 250 Orang | | |
| | | | | Pelatihan Aplikasi E- dan Data Kekerasan | Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi untuk memiliki profil perlindungan bagi perempuan dari tindak kekerasan | | | 1 Kegiatan/100 Orang | 50,000,000 | 1 Kegiatan/100 Orang | 50,000,000 | 1 Kegiatan/100 Orang | 75,000,000 | 1 Kegiatan/100 Orang | 100,000,000 | 1 Kegiatan/100 Orang | 100,000,000 | 100 Orang | | |
| | | | | Forum Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Kegiatan | | | 2 Kegiatan/100 Orang | 80,000,000 | 2 Kegiatan/100 Orang | 180,000,000 | 2 Kegiatan/100 Orang | 250,000,000 | 2 Kegiatan/100 Orang | 250,000,000 | 2 Kegiatan/100 Orang | 250,000,000 | 2 Kegiatan/100 Orang | | |
| | | | | Seminar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Kegiatan/Orang | | | 300 Orang | 150,000,000 | 300 Orang | 150,000,000 | 300 Orang | 150,000,000 | 300 Orang | 150,000,000 | 300 Orang | 150,000,000 | 1500 Orang | | |
| | | | | Kerjasama dengan dunia Usaha | Jumlah Kerjasama | | | 1 Dokumen | 50,000,000 | 1 Dokumen | 50,000,000 | 1 Dokumen | 75,000,000 | 1 Dokumen | 100,000,000 | 1 Dokumen | 100,000,000 | 1 Dokumen | | |
| | | | | Rapat Koordinasi Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Kegiatan | | | 1 Kegiatan/2 Hari | 100,000,000 | 1 Kegiatan/2 Hari | 150,000,000 | 1 Kegiatan/2 Hari | 175,000,000 | 1 Kegiatan/2 Hari | 200,000,000 | 1 Kegiatan/2 Hari | 250,000,000 | 1 Kegiatan/2 Hari | | |
| | | | | Sosialisasi dan Jelajah Program Unggulan (Three Ends) Pemberdayaan Perempuan dan Anak | Jumlah Kegiatan | | | 1 Kegiatan | 150,000,000 | 1 Kegiatan | 200,000,000 | 1 Kegiatan | 200,000,000 | 1 Kegiatan | 200,000,000 | 1 Kegiatan | 200,000,000 | 5 Kegiatan | | |
| | | | | Kajian terkait Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan serta Kesejahteraan Anak | Jumlah Kajian | | | 1 Dokumen | 90,000,000 | 1 Dokumen | 90,000,000 | 1 Dokumen | 150,000,000 | 1 Dokumen | 150,000,000 | 1 Dokumen | 150,000,000 | 5 Dokumen | | |
| | | | | Penyusunan Peraturan terkait Perlindungan Perempuan dan Anak | Jumlah Dokumen Peraturan | | | 1 Dokumen | 80,000,000 | 1 Dokumen | 80,000,000 | 1 Dokumen | 150,000,000 | 1 Dokumen | 150,000,000 | 1 Dokumen | 150,000,000 | 5 Dokumen | | |
| | | | | Rakor Data | Jumlah Kegiatan | | | - | - | 1 Kegiatan | 175,000,000 | 1 Kegiatan | 200,000,000 | 1 Kegiatan | 200,000,000 | 1 Kegiatan | 200,000,000 | 4 Kegiatan | | |
| | | | | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah Kegiatan/Kab/Kota | | | 15 Kab/Kota | 50,000,000 | 15 Kab/Kota | 50,000,000 | 15 Kab/Kota | 100,000,000 | 15 Kab/Kota | 150,000,000 | 15 Kab/Kota | 150,000,000 | 15 Kab/Kota | | |
| | | | | TOTAL | | | | | 8,342,000,000 | | 10,360,000,000 | | 13,262,500,000 | | 13,110,000,000 | | 14,610,000,000 | | | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | KETERANGAN |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | Listrik P2Tp2A, Telepon, THL, Media Cetak, Penggandaan dan ATK |
| | | | Honor Pengelola Keuangan, cetak dan Penggandaan |
| | | | Honor Pengelola Barang |
| | | | Administrasi Kepegawaian, Cetak Buku Kerja Pegawai |
| | | | Rakor BPP-PA, Koordinasi dalam daerah dan Konsultasi Luar Daerah |
| | | | |
| | | | 1 Kendaraan Dinas Roda Empat |
| | | | AC 1 PK 5 Unit, TV LED 1 buah, Simda Online 1 Unit, Personal Komputer 1 Buah, Laptop P2TP2A 1 Buah, Meja Kerja Es IV 9 Buah Kursi Kerja Es IV 9 Buah, Kursi Kerja Staf 26 buah, Lemari Arsip 3 Buah, Telephone mobile (on call) Layanan Pengaduan P2TP2A 2 Unit, Handy Talky 4 Unit |
| | | | Alat Listrik, Pengecatan Gedung P2Tp2A |
| | | | Bahan Bakar Minyak untuk 6 unit Kendaraan Dinas Roda 4, dan 7 unit Kendaraan Dinas roda 2, service Kendaraan dinas dan Pajak Kendaraan dinas |
| | | | AC, Laptop, Printer dan Camera |
| | | | |
| | | | |
| | | | 42 Stel/Orang Pakaian Putih |
| | | | 42 Stel/orang Pakaian Batik/Berbenan |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | Okiat Pim II |

| | | | KETERANGAN |
|--|--|--|---|
| | | | |
| | | | 45 Orang Pegawai BPP-PA |
| | | | 45 Orang Pegawai BPP-PA |
| | | | |
| | | | 5 Jenis Laporan/Dokumen |
| | | | 1 Laporan Semesteran |
| | | | 2 Jenis Dokumen |
| | | | |
| | | | Dokumen Rentra BPP-PA Prov. Sulut Tahun 2016-2020 |
| | | | Dokumen Renja BPP-PA 2017 |
| | | | Dokumen RKA BPP-PA 2017 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 80 Aparatur Perencana |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | KETERANGAN |
| | | | |
| | | | |
| | | | Koordinasi Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (advokat dan UPPA Polda/Polres/Kejaksaan, dan Pengadilan |
| | | | Pelaksanaan Musyawarah Anak Indonesia, dalam rangka Hari Anak Nasional dan kekhususan pada Kongres Anak Indonesia |
| | | | 1 Kegiatan Lembaga Peduli Anak |
| | | | Sosialiasi ttg Perlindungan Anak bagi Orang Tua, Guru dan Siswa dan Masyarakat |
| | | | Rakor Temis BPP-PA, dengan Kab/Kota dan Lembaga Terkali/Mitra BPP-PA Prov. Sult. 4 Kali |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | Kegiatan Pelayanan Pengaduan dan Fasilitas, Pendampingan Pemulangan Korban trafficking, kekerasan dan Operasional Sekretariat P2T/P2A |
| | | | Kegiatan Pelayanan Pengaduan dan Fasilitas, Pendampingan Pemulangan Korban Trafficking, kekerasan dan Operasional Sekretariat P2T/P2A |
| | | | Kegiatan Pelayanan Pengaduan dan Fasilitas, Pendampingan Pemulangan Korban Trafficking, kekerasan dan Operasional Sekretariat P2T/P2A |
| | | | Kegiatan Pelayanan Pengaduan dan Fasilitas, Pendampingan Pemulangan Korban Trafficking, kekerasan dan Operasional Sekretariat P2T/P2A |
| | | | Fasilitas upaya pemulangan korban trafficking , investigasi ,perjajakan dan pelaksanaan MCM tingkat penanganan trafficking 4 Provinsi |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | Pengumpulan Data Bidang PKHP |

| | | | |
|--|--|--|------------|
| | | | KETERANGAN |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | | | |
|--|--|--|------------|
| | | | KETERANGAN |
| | | | |
| | | | |